

**PENGARUH AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI
TERHADAP KINERJA KEUANGAN DENGAN
PROFESIONALISME SEBAGAI
VARIABEL MODERATING
(Studi pada SKPD di Kota Makassar)**

Skripsi

Untuk memenuhi salah satu persyaratan
Mencapai derajat Sarjana S-1

Program Studi Akuntansi



School Of Business

Diajukan oleh :

AYUNANDA

2015221850

**KONSENTRASI AKUNTANSI KOORPORASI
PROGRAM STUDI AKUNTANSI SEKOLAH
TINGGI ILMU EKONOMI NOBEL INDONESIA
MAKASSAR
2018**

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

**PENGARUH AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI TERHADAP
KINERJA KEUANGAN DENGAN PROFESIONALISME SEBAGAI
VARIABEL MODERATING
(Studi pada SKPD di Kota Makassar)**

Nama : AYUNANDA
NIM : 2015221850

telah dipertahankan dihadapan tim penguji Tugas Akhir/Skripsi STIE Nobel Indonesia pada tanggal 25 Februari 2019 dan dinyatakan diterima untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar Akademik
Sarjana Akuntansi – S.Ak

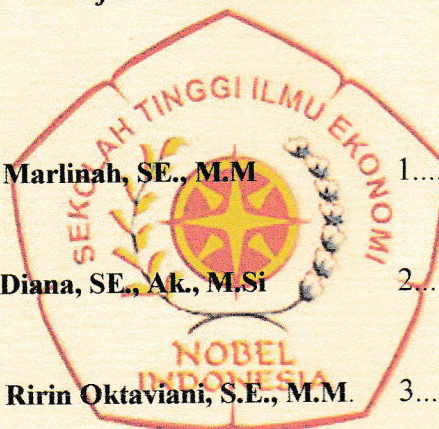
Makassar, 06 Juli 2019

Tim Penguji :

Ketua : Andi Marlinah, SE., M.M. 1.....

Sekretaris : Fina Diana, SE., Ak., M.Si 2.....

Anggota : Andi Ririn Oktaviani, S.E., M.M. 3.....



School Of Business

Mengesahkan,

Wakil Ketua I
Bidang Akademik

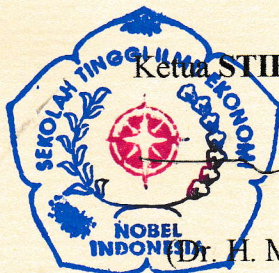
(Dr. Ahmad Firman S.E., M.Si)

Ketua Jurusan

(Indrawan Azis, SE., M.Ak)

Mengetahui,

Ketua STIE Nobel Indonesia Makassar



(Dr. H. Mashur Razak, S.E., M.M)

SURAT PERNYATAAN

Nama : Ayunanda
NIM : 2015221850
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Korporasi

Judul Skripsi :

Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Kinerja Keuangan Dengan Profesionalisme Sebagai Variabel Moderating (Studi Pada SKPD Di Kota Makassar)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya bahwa Skripsi yang saya buat adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali apabila dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan milik orang lain. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa adanya paksaan dan tekanan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan yang saya buat ini tidak benar.

Makassar, 25 Februari 2019

Yang menyatakan,



(Ayunanda)

ABSTRAK

Ayunanda. 2019. Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Kinerja Keuangan Dengan Profesionalisme Sebagai Variabel Moderating di SKPD Kota Makassar, pembimbing Andi Marlinah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap kinerja keuangan dengan profesionalisme sebagai variabel moderating. Data penelitian ini diperoleh dari kuisioner (primer) dengan mengambil responden sebanyak 35 pegawai SKPD. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Regresi Linier berganda dan moderating dengan menggunakan analisa statistik.

Hasil regresi berganda menunjukkan bahwa akuntabilitas dan transparansi berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Sedangkan hasil uji moderating diperoleh bahwa variabel profesionalisme sebagai variabel moderating dapat memperkuat hubungan antara akuntabilitas dan transparansi terhadap kinerja keuangan SKPD yang ada di Kota Makassar.

Kata Kunci: *Akuntabilitas, Transparansi, Kinerja Keuangan, dan Profesionalisme.*

NOBEL
INDONESIA INSTITUTE

ABSTRACT

Ayunanda. 2019. The Effect of Accountability and Transparency Toward Financial Performance With Professionalism as a Moderating Variable at Regional Work Unit of Makassar, supervised by Andi Marlinah.

This study aims to determine the effect of accountability and transparency toward financial performance with professionalism as a moderating variable. This study data was obtained from the questionnaire (primary) by taking respondents as many as 35 regional work unit employees. The data analysis used in this study is multiple linear regression and for moderating used analysis statistic.

Multiple regression results indicate that accountability and transparency had an effect toward financial performance. While the results of the moderating test found that the professionalism variable as a moderating variable can strengthen the relationship between accountability and transparency toward financial performance at regional work unit of Makassar.

Keywords: *Accountability, Transparency, Financial Performance, and Professionalism.*

NOBEL
INDONESIA INSTITUTE

MOTTO

*“Hiduplah seperti pohon kayu yang lebat buahnya,
hidup di tepi jalan dan dilempari orang dengan batu,
tetapi dibalas dengan buah.”*

(Abu Bakar Sibli)

PERSEMBAHAN

Dengan Penuh Kerendahan Hati Dan Rasa Syukur Tiada Henti,

Skripsi ini Kupersembahkan Untuk :

Kedua Orang Tuaku Tercinta

Saudara-Saudaraku

Sahabat-Sahabatku Teman-

Temanku

Dan Orang Terdekatku

KATA PENGANTAR

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan Syukur kehadiran Allah SWT, adalah ungkapan pertama yang penulis dapat ucapkan atas terselesaikannya proposal/skripsi ini. Skripsi dengan judul "Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Kinerja Keuangan dengan Profesionalisme Sebagai Variabel Moderating" ini penulis susun dalam rangka penyelesaian studi pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nobel Indonesia.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini penulis menemui banyak kendala. Oleh karena itu melalui kesempatan ini, penulis ingin menghaturkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. H. Mashur Razak, SE., MM selaku Ketua STIE Nobel Indonesia yang telah memberikan persetujuan untuk mengadakan penelitian.
2. Bapak Dr. Ahmad Firman, SE., M.Si selaku Wakil Ketua Satu Bidang Akademik yang telah memberikan arahan dan masukan bagi penulis.
3. Bapak Indrawan Azis, SE., M.Ak selaku Ketua Jurusan Akuntansi yang telah telah memberikan arahan dan masukan bagi penulis.
4. Ibu Fitriani Latief, SP., MM selaku Ketua P3M yang telah membantu sehingga penelitian ini dapat terlaksana.
5. Ibu Andi Marlinah, SE., M.M selaku pembimbing yang telah membimbing penulis mulai dari proposal penelitian hingga skripsi. Tanpa bantuan pembimbing skripsi ini tidak akan selesai sesuai dengan yang diharapkan.

6. Ibu Fina Diana, SE., Ak., M.Si selaku Tim Penguji yang telah memberikan arahan dan masukan bagi penulis.
7. Ibu Andi Ririn Oktaviani, SE., M.M selaku Tim Penguji yang telah memberikan arahan dan masukan bagi penulis.
8. Bapak/ Ibu Dosen yang telah begitu tulus membekali penulis dengan ilmu dan pelajaran yang sangat berharga.
9. Yang tersayang Ayahanda dan Ibunda tercinta serta saudara-saudara penulis yang telah banyak memberikan bantuan moril dan materil.
10. Kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersedia menerima peneliti untuk meneliti yaitu Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pendidikan, Dinas Perhubungan, Inspektorat Kota Makassar, Dinas Pertanahan dan Dinas Peternakan.
11. Kepada seluruh keluarga Himpunan Mahasiswa Akuntansi yang telah menjadi wadah untuk belajar bagi penulis.
12. Kepada seluruh teman-teman Akuntansi Siang yang selalu memberi semangat dan support bagi peneliti.
13. Kepada seluruh teman-teman KKN-PPM Posko 19 Desa Balleanging, Kec. Ujung Loe, Bulukumba yang selalu memberi semangat dan support bagi peneliti.
14. Kepada Muhammad Ilham Alam, Dian Ayu Safitri, Tri Dian AlMutahharah, Nurfadillah, Reski Hardianti, Rafiah Rahmadana J yang selalu memberi semangat dan support bagi peneliti.

15. Kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

Keberadaan skripsi ini merupakan sebuah simbol keberhasilan tersendiri bagi penulis. Kendatipun terwujudnya dalam format yang sangat sederhana dan penuh keterbatasan, penulis tetap berharap agar hasil karya ini menjadi sebuah titipan Allah SWT yang melalui tangan penulis dapat memberikan faedah kepada kita semua.

Akhir kata, semoga Allah SWT senantiasa selalu memberikan hidayah dan petunjuk kearah jalan yang benar bagi kita semua, Aamiin.

Makassar, Februari 2019

Penulis

AYUNANDA
NIM: 2015221850

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
ABSTRAK.....	iii
ABSTRACT.....	iv
MOTTO.....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Pembatasan Masalah.....	5
1.3 Rumusan Masalah.....	6
1.4 Tujuan Penelitian.....	6
1.5 Manfaat Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Pengertian Akuntansi.....	9
2.2 Laporan Keuangan.....	10
2.3 <i>Agency Theory</i>	12
2.4 <i>Ethical Behavior Theory</i>	14
2.5 Akuntabilitas.....	17
2.6 Transparansi.....	21
2.7 Kinerja Keuangan.....	23
2.8 Profesionalisme.....	27
2.9 Hubungan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Keuangan.....	31
2.10 Hubungan Transparansi Terhadap Kinerja Keuangan.....	32

	2.11 Profesionalisme Dalam Memperkuat atau Melemahkan Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Kinerja Keuangan.....	33
	2.12 Penelitian Terdahulu.....	34
	2.13 Kerangka Konseptual.....	36
	2.14 Hipotesis Penelitian.....	37
Bab III	METODE PENELITIAN	
	3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	39
	3.2 Populasi dan Sampel	39
	3.3 Metode Pengumpulan Data	41
	3.4 Jenis dan Sumber Data	42
	3.5 Metode Analisis Data	43
	3.6 Definisi Operasional Variabel.....	51
Bab IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	4.1 Gambaran umum tempat penelitian	56
	4.2 Hasil Penelitian.....	62
	4.3 Pembahasan	90
Bab V	PENUTUP	
	5.1 Kesimpulan.....	94
	5.2 Saran.....	94
	DAFTAR PUSTAKA	96
	LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

No.	Uraian	Halaman
1.	Gambar Kerangka Konseptual	36
2.	Gambar uji <i>scatterplot</i> persamaan pertama	82
3.	Gambar uji <i>scatterplot</i> persamaan kedua	82

DAFTAR TABEL

No.	Uraian	Halaman
1.	Tabel penelitian terdahulu	35
2.	Daftar nama kantor dinas Instansi Pemerintah Kota Makassar	40
3.	Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin.....	63
4.	Karakteristik responden berdasarkan pekerjaan	64
5.	Karakteristik responden berdasarkan pendidikan	65
6.	Karakteristik responden berdasarkan lama bekerja	65
7.	Karakteristik responden berdasarkan pendapatan.....	66
8.	Deskriptif variabel.....	67
9.	Tanggapan responden mengenai akuntabilitas	69
10.	Tanggapan responden mengenai transparansi.....	71
11.	Tanggapan responden mengenai profesionalisme.....	73
12.	Tanggapan responden mengenai kinerja keuangan.....	74
13.	Uji validitas	76
14.	Uji reliabilitas.....	77
15.	Hasil uji normalitas persamaan pertama	78
16.	Hasil uji normalitas persamaan kedua	79
17.	Hasil uji multikolinieritas persamaan pertama.....	80
18.	Hasil uji multikolinieritas persamaan kedua	80
19.	Hasil regresi berganda persamaan pertama.....	83
20.	Hasil regresi berganda persamaan kedua	84
21.	Koefisien determinasi persamaan pertama	85
22.	Koefisien determinasi persamaan kedua	86
23.	Hasil uji T (parsial) persamaan pertama	87
24.	Hasil uji T (parsial) persamaan kedua	87
25.	Hasil uji F (simultan)	89
26.	Hasil pengujian hipotesis	90

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Kuesioner penelitian
- Lampiran 2 Hasil olah data responden
- Lampiran 3 Hasil olah data statistik karakteristik responden, indikator variabel
- Lampiran 4 Stuktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum
- Lampiran 5 Stuktur organisasi Inspektorat Kota Makassar
- Lampiran 6 Stuktur organisasi Dinas Pendidikan
- Lampiran 7 Stuktur organisasi Dinas Perhubungan
- Lampiran 8 Stuktur organisasi Dinas Pertanahan
- Lampiran 9 Stuktur organisasi Dinas Perikanan dan Pertanian
- Lampiran 10 Surat izin penelitian dari Dinas Pekerjaan Umum
- Lampiran 11 Surat izin penelitian dari Inspektorat Kota Makassar
- Lampiran 12 Surat izin penelitian dari Dinas Pendidikan
- Lampiran 13 Surat izin penelitian dari Dinas Perhubungan
- Lampiran 14 Surat izin penelitian dari Dinas Pertanahan
- Lampiran 15 Surat izin penelitian dari Dinas Perikanan dan Pertanian
- Lampiran 16 Surat izin penelitian dari Badan Kesatuan Bangsa dan politik
- Lampiran 17 Surat izin penelitian dari Dinas Penanaman Modal dan pelayanan terpadu satu pintu
- Lampiran 18 Dokumentasi

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Terselenggaranya pemerintahan yang baik atau yang lebih dikenal dengan istilah *good governance* merupakan keinginan semua masyarakat saat ini di Indonesia. Beberapa institusi nasional maupun internasional pada beberapa tahun yang lalu telah mencetuskan konsep *good governance* dan mendefinisikan beberapa karakteristik dan prinsip didalamnya (Abdullah, 2010). Prinsip yang dimaksud disini adalah prinsip dalam *good governance* itu sendiri yakni prinsip partisipasi, kerangka hukum, transparansi, kesetaraan, daya tanggap, wawasan kedepan, akuntabilitas, efektif dan efisien, profesionalisme serta berorientasi pada konsensus. Menurut Iswahyudi dkk, (2016) dari beberapa prinsip *good governance* yang digunakan berbagai institusi pemerintahan, terlihat bahwa prinsip yang melandasi *good governance* sangat bervariasi dan disesuaikan dengan kondisi institusional. Dengan demikian, pemerintah disini dituntut untuk memberikan pertanggungjawaban yang lebih transparan, akuntabel serta akurat sebagai pelaku utama pelaksanaan *good governance* itu sendiri.

Penerapan *good governance* ditujukan agar pembangunan dan penyelenggara dari pemerintahan dapat berdaya dan berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, serta bebas dari budaya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Untuk mewujudkan cita-cita penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*), bersih dan berwibawa, konsistensi penerapan prinsip akuntabilitas

dan transparansi mutlak diperlukan. Seperti juga yang diungkapkan oleh Reza Nugraha bagian humas Pemkot Makassar dalam tribunmakassar.com (21 november 2018) yang telah melaksanakan seminar hubungan media dan pemerintah kota Makassar, Reza mengatakan bahwa kita ingin membangun sinergitas antara pemerintah dan media dalam upaya mendukung Pemerintah kota Makassar mewujudkan pemerintahan yang profesional, transparan dan akuntabel. Keingintahuan masyarakat tentang akuntabilitas pemerintahan tidak dapat dipenuhi hanya oleh informasi keuangan saja tetapi juga dapat mewujudkan pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, transparan dan bertanggung jawab serta bermanfaat bagi masyarakat.

Kita ketahui bersama bahwa memang akuntabilitas di dalam pemerintahan menjadi fokus utama masyarakat saat ini karena akuntabilitas dapat mencegah terjadinya praktek korupsi yang marak terjadi belakangan ini di Indonesia, oleh tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab atas wewenang yang telah diberikan kepadanya. Menurut Pangumbalerang dan Pinatik (2014) akuntabilitas diyakini mampu mengubah kondisi pemerintahan yang dapat memberikan pelayanan publik secara baik dan korupsi menuju suatu tatanan pemerintahan yang demokratis. Menumbuhkan kepercayaan publik atas apa yang diselenggarakan, direncanakan, dan dilaksanakan terhadap kinerja pengelolaan keuangan pemerintah sebagai wujud akuntabilitas merupakan hal penting dewasa ini.

Pada dasarnya penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi keuangan sangat membantu penyusunan anggaran pemerintah daerah (RAPBD) yang

objektif dan berkualitas. Prinsip akuntabilitas dan transparansi keuangan diyakini dapat mendukung usaha mewujudkan pilar-pilar penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Melalui informasi yang transparansi, dan mudah diakses, akan memudahkan publik untuk memahami dan berpartisipasi secara nyata dalam proses-proses yang berkepentingan dengan publik. Transparansi informasi akan membuka ruang transaksi sosial antara stakeholder dengan pemerintahan.

Tuntutan transparansi dalam *system* (Satuan Kerja Perangkat Daerah) SKPD semakin meningkat pada era reformasi saat ini, tidak terkecuali transparansi dalam pengelolaan keuangan di SKPD kota Makassar. Pejabat yang berwenang pada bidang keuangan kantor pada biro keuangan diwajibkan menyusun laporan pertanggungjawaban yang menggunakan system akuntansi yang diatur oleh pemerintah pusat dalam bentuk undang-undang dan peraturan pemerintah yang bersifat mengikat seluruh elemen pejabat pelaksana keuangan daerah. Transparansi lebih mengarah pada kejelasan yang ada pada mekanisme formulasi dan implementasi kebijakan, program dan proyek yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah. Rakyat secara pribadi dapat mengetahui secara jelas dan tanpa ada yang ditutup-tutupi tentang proses perumusan kegiatan publik dan implementasinya. Masyarakat atau publik cenderung terpinggirkan dan memiliki akses yang terbatas dalam kebijakan publik, maka dari itu pemerintah harus menghasilkan informasi yang berkualitas, mudah diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan serta masyarakat.

Tidak adanya prinsip akuntabilitas dan transparansi yang diterapkan di Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar, maka akan terjadi masalah seperti yang baru-baru ini terjadi ada 26 SKPD yang kinerjanya buruk dan diberikan rapor merah kepada SKPD tersebut ujar Walikota Makassar, Danny Pomanto dalam tribunmakassar.com (9 november 2018) Danny menjelaskan, rapor merah yang diberikan kepada SKPD ini karena tidak bisa merealisasikan program yang direncanakan sehingga anggaran masih mengendap di keuangan. Hal seperti inilah yang bisa memicu terjadi korupsi, oleh karena itu mengapa sangatlah penting dan mutlak diterapkannya prinsip akuntabilitas dan transparansi keuangan disetiap SKPD di kota Makassar sehingga masalah seperti di atas tidak ada lagi dan kinerjanya juga akan dinilai baik.

Kinerja dapat diukur dengan menganalisa dan mengevaluasi laporan keuangan. Kinerja seorang pegawai diukur menilai akuntabilitas pegawai dan SKPD dalam menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik. Akuntabilitas dan transparansi bukan sekedar kemampuan menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan secara ekonomis, efektif, dan efisien tetapi juga berperan untuk menciptakan indikator kinerja sebagai dasar untuk menilai kinerja. Kinerja itu adalah sebuah program serta kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi, misi, organisasi yang tertuang dalam perencanaan strategi organisasi.

Melihat dari fenomena diatas, penulis tertarik untuk melihat apakah dengan diterapkannya prinsip akuntabilitas dan transparansi akan mempengaruhi kinerja pegawai bagian keuangan yang dimana guna mewujudkan *good governance*, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul

“Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Kinerja Keuangan dengan Profesionalisme Sebagai Variabel Moderating (Studi Pada SKPD di Kota Makassar).” Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Irna Setiyanningrum pada tahun 2017. Faktor yang membedakan dari penelitian sebelumnya yaitu penelitian ini dilakukan pada (Satuan Kinerja Perangkat Daerah) SKPD di kota Makassar, sedangkan penelitian sebelumnya pada (Badan Usaha Milik Daerah) BUMD di Yogyakarta. Selain itu penelitian ini menggunakan variabel kinerja dengan profesionalisme sebagai variabel moderating, sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan variabel kinerja dengan konsep *Value For Money*. Serta penelitian ini hanya akan meneliti pengaruh akuntabilitas dan transparansi, sedangkan penelitian sebelumnya selain meneliti pengaruh akuntabilitas dan transparansi juga meneliti pengaruh pengawasan.

1.2 Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka batasan masalah pada penelitian ini dibatasi pada pengaruh empat variabel yang digunakan yaitu akuntabilitas dan transparansi terhadap kinerja keuangan dengan profesionalisme sebagai variabel moderating studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kota Makassar yang menjadi sampel penelitiannya adalah seluruh bagian dari populasi yang ditujukan pada pegawai bagian keuangan saja.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, adapun pertanyaan penelitian yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut :

1. Apakah akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pada SKPD di Kota Makassar?
2. Apakah transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pada SKPD di Kota Makassar?
3. Apakah profesionalisme dapat memperkuat pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap kinerja keuangan pada SKPD di Kota Makassar ?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis pengaruh akuntabilitas dan signifikansi terhadap kinerja keuangan pada SKPD di Kota Makassar.
2. Untuk menganalisis pengaruh transparansi dan signifikansi terhadap kinerja keuangan pada SKPD di Kota Makassar.
3. Untuk menganalisis profesionalisme dalam menguatkan atau bahkan melemahkan pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap kinerja keuangan pada SKPD di Kota Makassar.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori keagenan (*Agency Theory*). Masalah keagenan (*agency problem*) pada awalnya dieksplorasi oleh Ross (1973), sedangkan eksplorasi teoritis secara mendetail dari teori keagenan pertama kali dinyatakan oleh Jensen dan Mecking (1976) yang menyebutkan manajer suatu perusahaan sebagai “agen” dan pemegang saham “*principal*”. Kegunaan teori keagenan dalam penelitian ini yakni untuk membuktikan apakah teori tersebut dapat memperkuat hasil penelitian ini atau sebaliknya melemahkan teori tersebut. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi tambahan pengetahuan dibidang keuangan atau penganggaran pada sektor publik terutama masalah akuntabilitas dan transparansi terhadap kinerja keuangan dikuatkan dengan profesionalisme pada SKPD di Kota Makassar, sehingga masyarakat menjadi semakin tahu bahwa anggaran yang baik akan membantu meningkatkan kinerja pegawai SKPD.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pegawai SKPD

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi atau sumbangan pemikiran bagi pegawai SKPD dalam mengambil kebijakan-kebijakan dalam rangka untuk meningkatkan kualitas pengelolaan

keuangan yang dibuat, sehingga pengelolaan keuangan yang dibuat dapat tepat sasaran dan mencapai tujuan serta dapat terhindar dari tindakan-tindakan penyelewengan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang dapat merugikan SKPD tersebut.

b. Bagi Pihak Lain

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi sumber informasi yang dapat digunakan sebagaimana mestinya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Akuntansi

Akuntansi adalah suatu proses mencatat, mengklasifikasikan, meringkas, mengolah dan menyajikan data transaksi serta kejadian yang berhubungan dengan keuangan sehingga dapat digunakan oleh orang yang menggunakannya dengan mudah dan dimengerti untuk pengambilan suatu keputusan serta tujuan lainnya.

Menurut *American Accounting Association* (AAA) akuntansi merupakan suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, dan pelaporan informasi ekonomi, yang memungkinkan adanya penilaian dan pengambilan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut.

Menurut Kieso, et al. (2016:2) pengertian akuntansi adalah :

“Accounting consist of the three basic activities-it identifies, records, and communicates the economic events of an organization to interest users. A company identifies the economic events relevant to its business and then records those events in order to provide a history of financial activities. Recording consists of keeping a systematic, chronological diary of events, measured in dollar and cents. Finally, communicates the collected information to interest user by means accounting reports are called financial statement”.

Penjelasan di atas dapat diartikan bahwa akuntansi terdiri dari tiga kegiatan yang mendasar yaitu identifikasi, pencatatan dan pengkomunikasian peristiwa ekonomi suatu organisasi kepada pihak yang berkepentingan. Perusahaan mengidentifikasi peristiwa ekonomi sesuai dengan kegiatan usahanya dan mencatat peristiwa tersebut untuk menyediakan catatan kegiatan keuangan.

Pencatatan dilaksanakan secara sistematis, kronologis setiap peristiwa, dalam satuan mata uang. Akhirnya pada pengkomunikasian kumpulan informasi tersebut kepada pihak yang berkepentingan dalam bentuk laporan akuntansi atau dikenal dengan laporan keuangan.

Dari definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, dan pengkomunikasian hasil akhir berupa laporan keuangan yang mencerminkan keadaan perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

2.2 Laporan Keuangan

2.2.1 Pengertian Laporan Keuangan

Menurut Kasmir (2016:7) laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu. Sedangkan menurut Fahmi (2014:31) laporan keuangan merupakan suatu informasi yang menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan ataupun pemerintah, dan lebih jauh informasi tersebut dapat dijadikan sebagai gambaran kinerja keuangan perusahaan ataupun pemerintah tersebut.

Dari definisi-definisi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan adalah hasil akhir proses akuntansi berupa media pengkomunikasian kinerja dan posisi keuangan perusahaan yang didalamnya terdapat laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, laporan arus kas, laporan perubahan modal, dan catatan atas laporan keuangan kepada pihak yang berkepentingan atau pengguna laporan keuangan.

2.2.2 Tujuan Laporan Keuangan

Laporan keuangan dibuat bertujuan untuk menyampaikan informasi tentang kondisi perusahaan pada waktu tertentu kepada para pengguna laporan keuangan. Para pengguna laporan keuangan menggunakan informasi tersebut untuk memilih alternatif keputusan yang akan diambil.

Tujuan laporan keuangan menurut PSAK 1 (2015:1.3) adalah untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomik”.

Adapun tujuan kualitatif yang dirumuskan APB Statements No.4 (AICPA) adalah sebagai berikut :

- a. Relevan
- b. Dapat dimengerti
- c. Dapat dicek kebenarannya
- d. Netral
- e. Tepat waktu
- f. Dapat diperbandingkan
- g. Lengkap

Menurut Fahmi (2014:31) sebuah laporan keuangan pada umumnya terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan arus kas serta catatan atas laporan keuangan.

2.3 *Agency Theory*

Teori keagenan (*agency theory*) pada dasarnya merupakan teori yang muncul karena adanya konflik kepentingan antara prinsipal dan agen. Teori ini mengasumsikan bahwa masing-masing individu semata-mata termotivasi oleh kepentingan dirinya sendiri sehingga menimbulkan konflik kepentingan antara prinsipal dan agen. Konflik yang dimaksud disini adalah konflik antara manajemen selaku agen dengan pemilik selaku prinsipal.

Perspektif teori agensi merupakan dasar yang digunakan memahami isu *corporate governance dan earning management*. Dengan adanya hubungan yang asimetri antara pemilik dan pengelola, maka untuk menghindari terjadinya hubungan tersebut dibutuhkan suatu konsep yaitu konsep *Good Corporate Governance* yang bertujuan untuk menjadikan perusahaan menjadi lebih sehat dan bersih. Penerapan *corporate governance* berdasarkan pada teori agensi, yaitu teori agensi dapat dijelaskan dengan hubungan antara manajemen dengan pemilik, manajemen secara moral bertanggung jawab untuk mengoptimalkan keuntungan para pemilik (*principal*) dan sebagai imbalannya akan memperoleh kompensasi yang sesuai dengan kontrak.

Menurut Iswahyudi dkk, (2016) Teori keagenan dilandasi oleh 3 asumsi yaitu:

- (1) Asumsi tentang sifat manusia, menekankan bahwa manusia memiliki sifat untuk mementingkan diri sendiri (*self interest*), memiliki keterbatasan rasionalitas (*bounded rationality*), dan tidak menyukai risiko (*risk aversion*),

- (2) Asumsi tentang keorganisasian, adalah adanya konflik antar anggota organisasi, efisiensi sebagai kriteria produktivitas, dan adanya *information asymmetry* antara prinsipal dan agen,
- (3) Asumsi tentang informasi, adalah bahwa informasi dipandang sebagai barang komoditi yang bisa diperjual-belikan.

Di organisasi publik khususnya di pemerintahan daerah, teori keagenan ini telah dipraktikkan, termasuk pemerintahan daerah di Indonesia, apalagi sejak otonomi dan desentralisasi diberikan kepada pemerintah daerah sejak tahun 1999. *Agency theory* yang terkait dengan pemerintahan dalam hubungan *agent dan principal* lebih menekankan pada penentuan yang lebih baik mengenai efisiensi dalam kontrak antara *principal dan agent* menyangkut hal publik, organisasi dan informasi (Iswahyudi dkk, 2016). Akuntabilitas dalam hubungan *agent dan principal* menjadi penting untuk menunjukkan bahwa *agent* telah melakukan sesuatu sesuai dengan arahan *principal*. Penyusunan laporan keuangan merupakan salah satu bentuk transparansi yang merupakan syarat pendukung adanya akuntabilitas (Asrida, 2012).

Teori keagenan akan terjadi pada berbagai organisasi termasuk dalam organisasi pemerintahan dan berfokus pada persoalan ketimpangan/asimetri informasi antara pengelola (agen/pemerintah) dan publik (diwakili prinsipal/dewan). Prinsipal harus memonitor kerja agen, agar tujuan organisasi dapat dicapai dengan efisien serta tercapainya akuntabilitas publik (Arief, 2013). Akuntabilitas publik sebagai kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan

segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (prinsipal) yang memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Praktek pelaporan keuangan dalam organisasi sektor publik merupakan suatu konsep yang didasari oleh teori keagenan. Pemerintah yang bertindak sebagai agen mempunyai kewajiban menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna informasi keuangan pemerintah yang bertindak sebagai prinsipal dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik serta baik secara langsung atau tidak langsung melalui wakil-wakilnya (Purnomo, 2016). Dengan demikian, hubungan prinsipal dan agen memberi konsekuensi, bahwa manajemen berkewajiban beertanggungjawab apa yang telah diamanahkan oleh prinsipal. Agen dapat akuntabel kepada prinsipal, jika agen berkewajiban bertindak pada kepentingan prinsipal dan prinsipal memberi kuasa untuk penghargaan (*reward*) terhadap kinerja agen atau hukuman (*punish*) dalam ketidakmampuan agen.

2.4 *Ethical Behavior Theory*

Perilaku etika merupakan fondasi peradaban modern menggarisbawahi keberhasilan berfungsinya hampir setiap aspek masyarakat, dari kehidupan keluarga sehari-hari sampai hukum, kedokteran, dan bisnis. Etika (*ethic*) mengacu pada suatu sistem atau kode perilaku berdasarkan kewajiban moral yang menunjukkan bagaimana seorang individu harus berperilaku dalam masyarakat. Teori *Behavioristik* adalah teori yang mempelajari perilaku manusia (Amalia dan Fadholi, 2014). Perspektif *behavioral* berfokus pada peran dari belajar dalam

menjelaskan tingkah laku manusia dan terjadi melalui rangsangan berdasarkan (stimulus) yang menimbulkan hubungan perilaku reaktif (*respons*) hukum-hukum mekanistik. Asumsi dasar mengenai tingkah laku menurut teori ini adalah bahwa tingkah laku sepenuhnya ditentukan oleh aturan, bisa diramalkan, dan bisa ditentukan (Fahyuni dan Istikomah, 2016).

Perilaku etika juga merupakan fondasi profesionalisme modern. Profesionalisme didefinisikan secara luas, mengacu pada perilaku, tujuan, atau kualitas yang membentuk karakter atau memberi ciri suatu profesi atau orang-orang profesional (Singgih dan Icu, 2010). Seluruh profesi menyusun aturan atau kode perilaku yang mendefinisikan perilaku etika bagi anggota profesi tersebut. S. M. Mintz telah mengusulkan bahwa terdapat tiga metode atau teori perilaku etika yang dapat menjadi pedoman analisis isu-isu etika dalam akuntansi. Teori ini antara lain, yaitu :

- (1) Paham manfaat atau *utilitarianisme*
- (2) Pendekatan berbasis hak (*rights based approach*), dan
- (3) Pendekatan berbasis keadilan (*justice based approach*).

Profesionalisme didefinisikan secara luas, mengacu pada perilaku, tujuan, atau kualitas yang membentuk karakter atau memberi ciri suatu profesi atau orang-orang profesional. Seluruh profesi menyusun aturan atau kode perilaku yang mendefinisikan perilaku etika bagi anggota profesi tersebut. Untuk menjadi sumber objektif yang dapat dipercaya, profesional harus memiliki reputasi yang kuat tidak hanya untuk kompetensi tetapi juga untuk karakter dan integritas yang tidak diragukan lagi. Mengingat pentingnya reputasi, perilaku etika, dan

profesionalisme, profesi akuntan telah mengembangkan kode perilaku profesional yang memberikan pedoman pada perilaku profesional akuntansi.

Beberapa pilihan etika cukup sulit karena godaan atau tekanan atau mengikuti kepentingan pribadi seseorang, yang dapat menutupi pertimbangan terkait dengan apa yang benar atau salah (Fahyuni dan Istikomah, 2016). Pilihan lain diperumit oleh kesulitan memilih isu dan menguraikan tindakan apa yang mungkin tepat atau tidak tepat untuk diambil. Enam prinsip-prinsip perilaku profesional:

- (1) Tanggung jawab: dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai profesional, anggota harus melaksanakan pertimbangan profesional dan moral dalam seluruh keluarga
- (2) Kepentingan publik: anggota harus menerima kewajiban untuk bertindak dalam suatu cara yang akan melayani kepentingan publik, menghormati kepercayaan publik, dan menunjukkan komitmen pada profesionalisme
- (3) Integritas: untuk mempertahankan dan memperluas keyakinan publik, anggota harus melaksanakan seluruh tanggung jawab profesional dengan perasaan integritas tinggi
- (4) Objektivitas dan independensi: anggota harus mempertahankan objektivitas dan bebas dari konflik penugasan dalam pelaksanaan tanggung jawab profesional
- (5) Kecermatan dan keseksamaan: anggota harus mengamati standar teknis dan standar etik profesi

- (6) Lingkup dan sifat jasa: anggota dalam praktik publik harus mengamati prinsip-prinsip perilaku profesional dalam menentukan lingkup dan sifat jasa yang akan diberikan.

Perilaku etis dan tidak etis adalah produk dari kombinasi yang rumit dari berbagai pengaruh. Individu mempunyai kombinasi unik dari karakteristik personalitas, nilai-nilai, prinsip-prinsip moral, pengalaman pribadi. Perilaku Etis yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan nilai-nilai tingkah laku atau aturan-aturan tingkah laku yang diterima dan digunakan oleh seseorang atau profesi yang meliputi kepribadian, kecakapan professional, tanggung jawab, kejujuran, keadilan, pelaksanaan kode etik, dan penafsiran dan penyempurnaan kode etik.

2.5 Akuntabilitas

Akuntabilitas berasal dari istilah dalam bahasa Inggris yaitu *accountability*, yang berarti pertanggungjawaban atau keadaan untuk dipertanggungjawabkan atau keadaan untuk diminta pertanggungjawaban. Akuntabilitas menjadi kunci serta menjadi salah satu unsur pokok dari *good governance*. Menurut Iswahyudi dkk, (2016) akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban pihak yang diberi mandat untuk memerintah kepada yang memberi mandat. Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban dengan menciptakan pengawasan melalui distribusi kekuasaan pada berbagai lembaga pemerintah sehingga mengurangi penumpukan kekuasaan, sekaligus menciptakan kondisi saling mengawasi.

Menurut Asrida (2012) akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang atau badan hukum atau pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Purnomo, 2016). Dari semua definisi diatas dapat dikatakan bahwa akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban atas segala yang dilakukan oleh pimpinan atau lembaga yang memberi wewenang dan akuntabilitas merupakan prinsip yang menjamin bahwa setiap kegiatan suatu organisasi atau perorangan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada masyarakat.

Berdasarkan beberapa akuntabilitas yang dilihat dari berbagai sudut pandang tersebut, maka akuntabilitas dapat diartikan sebagai kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala tindak lanjut dan kegiatan seseorang atau lembaga terutama bidang administrasi keuangan kepada pihak yang lebih tinggi. Akuntabilitas dalam konteks pemerintahan mempunyai arti pertanggungjawaban yang merupakan salah satu ciri dari terapan *good governance* (Iswahyudi dkk., 2016). Pemikiran ini bersumber dari pemikiran administrasi publik merupakan isu menuju *clean goverment* atau pemerintahan yang bersih. Akuntabilitas dilihat dari

sudut pandang pengendalian merupakan tindakan pada pencapaian tujuan (Asrida, 2012).

2.5.1 Sifat akuntabilitas

Laporan keuangan pemerintah harus menyediakan informasi yang dapat dipakai oleh pengguna laporan keuangan untuk menilai akuntabilitas pemerintahan dalam membuat keputusan ekonomi, sosial dan politik (Purnomo, 2016). Akuntabilitas diartikan sebagai hubungan antara pihak yang memegang kendali dan mengatur entitas dengan pihak yang memiliki kekuatan formal atas pihak pengendali tersebut. Dalam hal ini dibutuhkan juga pihak ketiga yang *accountable* untuk memberikan penjelasan atau alasan yang masuk akal terhadap seluruh kegiatan yang dilakukan dan hasil usaha yang diperoleh sehubungan dengan pelaksanaan suatu tugas dan pencapaian suatu tujuan tertentu.

Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan, akuntabilitas pemerintah tidak dapat diketahui tanpa pemerintah memberitahukan kepada rakyat tentang informasi sehubungan dengan pengumpulan sumber daya dan sumber dana masyarakat beserta penggunaannya. Dari perspektif akuntansi, *American Accounting Association* menyatakan bahwa akuntabilitas suatu entitas pemerintahan dapat dibagi dalam empat kelompok, yaitu akuntabilitas terhadap : (1) Sumber daya finansial

- (2) Kepatuhan terhadap aturan hukum dan kebijaksanaan administratif
- (3) Efisiensi dan ekonomisnya suatu kegiatan
- (4) Hasil program dan kegiatan pemerintah yang tercermin dalam pencapaian tujuan manfaat dan efektivitas.

2.5.2 Dimensi Akuntabilitas

Akuntabilitas publik yang harus dilakukan oleh organisasi sektor publik terdiri atas beberapa dimensi. Ellwood menjelaskan terdapat empat dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik, yaitu sebagai berikut :

- (1) Akuntabilitas hukum dan kejujuran terdiri dari kepatuhan terhadap hukum dan penghindaran korupsi dan kolusi
- (2) Akuntabilitas proses terdiri dari adanya kepatuhan terhadap prosedur, adanya pelayanan publik yang responsif, adanya pelayanan publik yang cermat dan adanya pelayanan publik yang biaya murah
- (3) Akuntabilitas program terdiri dari alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dan mempertanggungjawabkan yang telah dibuat
- (4) Akuntabilitas kebijakan terdiri dari mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah diambil.

Setiyanningrum (2017) menyatakan bahwa akuntansi sektor publik tidak bisa melepaskan diri dari pengaruh kecenderungan menguatnya tuntutan akuntabilitas sektor publik tersebut. Akuntansi sektor publik disini dituntut untuk dapat menjadi alat perencanaan dan pengendalian organisasi sektor publik secara efektif dan efisien, serta memfasilitasi terciptanya akuntabilitas sektor publik.

Adapun yang menjadi indikator menurut Lalolo (2003) dibagi menjadi lima yaitu :

- a. Kepatuhan terhadap hukum
- b. Penghindaran korupsi dan kolusi

- c. Adanya kepatuhan terhadap prosedur
- d. Adanya pelayanan publik yang cermat
- e. Adanya pelayanan publik yang murah
- f. Adanya pengawasan terhadap pertanggungjawaban anggaran
- g. Mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah diambil
- h. Keterbukaan kepada media massa terhadap akses publik.

2.6 Transparansi

Menurut Abdullah (2010) transparansi berarti keterbukaan (*openness*) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumberdaya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Transparansi merupakan salah satu prinsip dari *good governance*. Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang kebijakan proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil yang dicapai (Iswahyudi dkk, 2016). Prinsip ini memiliki dua aspek yaitu komunikasi publik oleh pemerintah, dan hak masyarakat terhadap informasi akses informasi. Keduanya akan sangat sulit dilakukan jika pemerintah tidak menangani dengan baik kinerjanya.

Transparansi per definisi artinya cukup jelas, terbuka, dapat dilihat dan dapat diakses. Dalam bidang pelayanan publik atau masyarakat transparansi berarti masyarakat dapat mengetahui, memahami dan mengakui adanya hak dan kewajiban masyarakat atas pelayanan yang diperlukannya (Asrida, 2012). Transparansi dibangun atas dasar kebebasan informasi. Prinsip transparansi paling tidak dapat diukur melalui sejumlah indikator seperti akses yang menjamin sistem

keterbukaan dari semua proses pelayanan publik. Selanjutnya mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan publik tentang berbagai kebijakan dan pelayanan publik, maupun proses-proses didalam sektor publik. Kemudian mekanisme yang memfasilitasi pelaporan maupun penyebaran informasi maupun penyimpangan tindakan aparat publik didalam kegiatan melayani (Iswahyudi dkk, 2016).

2.6.1 Indikator Transparansi

Adanya Transparansi membawa dampak positif bagi kepentingan publik. Beberapa manfaat penting adanya transparansi keuangan yaitu dapat mencegah terjadinya korupsi, mudah dalam mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan kebijakan, meningkatkan akuntabilitas pemerintah sehingga masyarakat akan lebih mampu mengukur kinerja pemerintah, meningkatkan kepercayaan terhadap komitmen pemerintah untuk memutuskan kebijakan tertentu, menguatkan kohesi social, karena kepercayaan publik terhadap pemerintah akan terbentuk dan menciptakan iklim investasi yang lebih baik sehingga dapat meningkatkan kepastian usaha (Andrianro, 2007:21).

Transparansi dapat diukur dengan beberapa indikator. Menurut Andrianto (2007:21), indikator transparansi yaitu :

- a. Informasi yang disampaikan akurat dan jelas
- b. Merespon dengan cepat setiap pengaduan yang diajukan
- c. Adanya kebebasan kepada setiap pegawai terhadap informasi
- d. Mengutamakan kepentingan publik dan golongan
- e. Melaporkan pertanggungjawaban keuangan setiap tahun
- f. Adanya kerjasama yang baik antara non pemerintah dan media massa

- g. Memberikan akses yang mudah kepada pemangku kepentingan (*stakeholder*) terhadap dokumen RAPBD (Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah)
- h. Adanya pembagian peran dan tanggungjawab yang jelas
- i. Diterapkannya E-budgeting
- j. Adanya pengawasan terhadap perancangan anggaran.

2.7 Kinerja Keuangan

Kata kinerja merupakan istilah yang sudah lazim diberikan untuk kata “*Performance*” yang berarti pekerjaan dan perbuatan. Dalam pengertian yang lebih luas kata-kata *performance* selalu dipergunakan dengan kata-kata seperti *job performance* atau *work performance* yang berarti hasil kerja atau prestasi kerja. Kinerja merupakan suatu prestasi yang ditunjukkan oleh manajer dan unit organisasi yang dipimpinnya, dalam hal ini adalah kinerja manajer sektor publik. Kinerja seorang manajer diukur menilai akuntabilitas manajer dan organisasi dalam menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik. Akuntabilitas dan transparansi bukan sekedar kemampuan menunjukkan bahwa uang publik tersebut.

Penilaian kinerja merupakan bagian penting dari seluruh proses kegiatan pegawai yang bersangkutan. Penilaian kinerja (*Performance Appraisal*) adalah suatu sistem yang digunakan untuk menilai dan mengetahui sejauh mana seorang karyawan telah melaksanakan pekerjaannya secara keseluruhan (Asrida, 2012). Penilaian kinerja bertujuan untuk memberikan *feedback* kepada pegawai dalam upaya memperbaiki tampilan kerja, meningkatkan produktivitas, dan sebagai

dasar pengambilan berbagai kebijakan terhadap pegawai. Penilaian kinerja menjadi suatu pedoman dalam bidang personalia yang diharapkan dapat menunjukkan kepuasan kerja para karyawan secara rutin dan teratur (Januari dkk., 2015).

Penilaian kinerja merupakan kajian sistematis tentang kondisi kerja karyawan yang dilaksanakan secara formal yang dikaitkan dengan standar kinerja yang telah ditentukan oleh perusahaan. Asrida (2012) berpendapat bahwa penilaian kinerja adalah mengevaluasi dari seorang karyawan baik saat ini maupun dimasa lalu dihubungkan dengan standar kinerja dari karyawan tersebut. Hasil penilaian kinerja dapat menunjukkan apakah SDM telah memenuhi tuntutan yang dikehendaki perusahaan, baik dilihat dari sisi kualitas maupun kuantitas. Metode penilaian kinerja harus mencakup lima hal, yaitu *relevance* (kesesuaian hasil dan tujuan), *acceptability* (dapat diterima), *reliability* (dapat dipercaya), *sensitivity* (dapat membedakan hasil kerja), dan *practically* (meningkatkan produktivitas). Penilaian penetapan penilai sangat erat hubungannya dengan persoalan apakah hasil penilaian obyektif atau tidak. Pelaksanaan penilaian kinerja harus mencakup dua hal, yaitu: waktu pelaksanaan dan konteks penilaian.

2.7.1 Manfaat Penilaian Kinerja

Salah satu sarana manajemen paling penting yang harus dibebankan agar tujuan organisasi dapat tercapai adalah faktor manusia. Tanpa manusia yang berkualitas, betapapun canggihnya sistem yang dirancang, tujuan organisasi mungkin hanya sekedar angan-angan saja. Disamping sarana, prinsip-prinsip organisasi harus pula dipenuhi seperti adanya pembagian tugas yang adil,

pendelegasian tugas, rentang kekuasaan, tingkat pengawasan yang cukup, kesatuan perintah dan tanggung jawab serta koordinasi masing-masing unit merupakan suatu hal yang terus menerus disempurnakan (Januari dkk., 2015). Untuk itu penilaian kinerja dimanfaatkan oleh manajemen untuk hal-hal sebagai berikut :

- (1) Mengelola operasi organisasi secara efektif dan efisien melalui pemitivasian karyawan secara maksimum
- (2) Membantu pengambilan keputusan yang bersangkutan dengan karyawan seperti promosi, transfer dan pemberhentian
- (3) Mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan karyawan dan untuk menyediakan kriteria seleksi dan evaluasi program pelatihan karyawan
- (4) Menyediakan umpan balik bagi karyawan mengenai bagaimana atasan mereka menilai kinerja mereka
- (5) Menyediakan suatu dasar bagi distribusi penghargaan

2.7.2 Dimensi Kinerja

Indikator kinerja antara lain *economy*, *efficiency*, *effectiveness*, dan *equity*. Secara lebih lanjut menurut Januari dkk., (2015) indikator tersebut diuraikan sebagai berikut : (a) *economy* atau ekonomis adalah penggunaan sumber daya sesedikit mungkin dalam proses penyelenggaraan pelayanan publik (b) *efficiency* atau efisiensi adalah suatu keadaan yang menunjukkan tercapainya perbandingan terbaik antara masukan dan keluaran dalam penyelenggaraan pelayanan publik (c) *effectiveness* atau efektivitas adalah tercapainya tujuan yang telah ditetapkan, baik

itu dalam bentuk target, sasaran jangka panjang maupun misi organisasi (d) *equity* atau keadilan adalah pelayanan publik yang diselenggarakan dengan memperhatikan aspek-aspek pemerataan (e) *evaluation* atau evaluasi yaitu melakukan evaluasi terhadap setiap tindakan yang dilakukan. Mengukur kinerja birokrasi publik berdasar adanya dimensi yang secara lebih lanjut yaitu meliputi lima dimensi antara lain produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas dan akuntabilitas.

Mengenai akuntabilitas, Asrida (2012) mengemukakan bahwa akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagai suatu ukuran yang menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian penyelenggaraan pelayanan dengan ukuran nilai-nilai dan norma eksternal yang ada di masyarakat atau yang dimiliki oleh para stakeholders. Acuan pelayanan yang digunakan oleh organisasi publik juga dapat menunjukkan tingkat akuntabilitas pemberian pelayanan publik. Acuan pelayanan yang dianggap paling penting oleh suatu organisasi publik adalah dapat merefleksikan pola pelayanan yang dipergunakan yaitu pola pelayanan yang akuntabel yang mengacu pada kepuasan publik sebagai pengguna jasa. Akuntabilitas dalam penggunaan anggaran merupakan bentuk pertanggungjawaban instansi pemerintah atas penyelenggaraan pelayanan publik, kemudian publik memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung (Januari dkk., 2015).

2.8 Profesionalisme

Profesionalisme adalah mutu, kualitas dan tindak tanduk yang merupakan ciri suatu profesi atau orang yang profesional. Seseorang dikatakan profesional jika memenuhi tiga kriteria, yaitu mempunyai keahlian untuk melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya, melaksanakan suatu tugas atau profesi dengan menetapkan standar baku dibidang profesi yang bersangkutan dan menjalankan tugas profesinya dengan mematuhi etika profesi yang telah ditetapkan (Fujianti, 2012).

Profesional adalah tanggung jawab untuk bertindak lebih dari sekedar memenuhi tanggung jawab untuk bertindak lebih dari sekedar memenuhi tanggung jawab diri sendiri maupun ketentuan hukum dan peraturan masyarakat. Akuntan publik, sebagai profesional, mengakui adanya tanggung jawab kepada masyarakat, klien serta rekan praktisi, termasuk perilaku yang terhormat meskipun itu berarti pengorbanan diri.

Menurut Hall (2010) sikap profesionalisme adalah sikap seseorang terhadap pekerjaannya, yang menilai melalui lima dimensi sebagai berikut :

(1) Pengabdian pada profesi

Profesionalisme adalah suatu pandangan yang dicerminkan oleh dedikasi seseorang dalam menggunakan pengetahuan dan kecakapan yang dimiliki. Sikap ini berhubungan dengan keteguhan tekad individu untuk tetap melaksanakan pekerjaan berkurang. Sikap pada dimensi ini merupakan ekspresi diri terhadap pekerjaannya.

(2) Kewajiban sosial

Dimensi ini menjelaskan manfaat yang dihasilkan, baik oleh masyarakat dengan adanya suatu pekerjaan dan bagi yang professional.

(3) Kemandirian

Dimensi ini menyatakan bahwa profesional harus mampu membuat keputusan sendiri tanpa melibatkan orang lain. Rasa kemandirian berasal dari kebebasan melakukan apa yang terbaik menurut pekerja yang terkait dalam situasi khusus.

(4) Keyakinan terhadap profesi

Keyakinan yang paling penilaian kinerja profesional bukan merupakan pihak yang tidak memiliki kompetensi dalam bidang ilmu dan pekerjaan mereka.

(5) Hubungan dengan sesama profesi

Profesionalisme mensyaratkan adanya ikatan profesi baik dalam organisasi formal maupun kelompok kolega informal sebagai sumber utama ide utama pekerjaan.

Nilai-nilai profesionalisme merupakan kombinasi atau gabungan dari integritas, disiplin, dan kompetensi. Integritas berkaitan dengan kualitas moral yang dituntut dari setiap aparat Ditjen (Direktorat Jenderal) Pajak yaitu jujur dan bersih dari tindakantindakan tercela serta senantiasa mengutamakan kepentingan negara. Disiplin berkaitan dengan ketaatan baik ketaatan terhadap berbagai peraturan perundangundangan yang berlaku maupun ketaatan terhadap kerangka waktu yang telah ditetapkan. Nilai-nilai disiplin menuntut setiap aparat Ditjen Pajak untuk mematuhi sistem dan prosedur kerja yang telah ditetapkan, mematuhi

peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menaati berbagai batasan waktu yang ditetapkan. Kompetensi berkaitan dengan kemampuan dan pengetahuan atau penguasaan atas bidang tugas masing-masing. Nilai-nilai kompetensi menuntut setiap aparat Ditjen Pajak harus benar-benar menguasai bidang tugasnya serta mampu melaksanakan tugasnya dengan benar, efektif dan efisien.

Menurut Martin (dalam Agung Kurniawan 2015:74) menyatakan bahwa karakteristik profesionalisme pegawai sesuai dengan tuntutan *good governance*, diantaranya adalah :

1. *Equality* : Perlakuan yang sama atas pelayanan yang diberikan
2. *Equity* : Perlakuan yang sama kepada masyarakat secara adil dan adanya kesetaraan
3. *Loyalty* : Kesetiaan diberikan kepada konstitusi, hukum, pimpinan, bawahan, rekan kerja
4. *Accountability* : Setiap aparat pemerintah harus siap menerima tanggung jawab atas apapun yang ia kerjakan dan harus menghindarkan diri dari kata-kata seperti ini “saya sekedar melaksanakan perintah atasan”.

Berdasarkan karakteristik diatas dapat diketahui bahwa profesionalisme pegawai sangat ditentukan oleh tingkat kemampuan pegawai yang tercermin melalui sikap dan perilakunya sehari-hari dalam organisasi atau pemerintahan.

Adapun beberapa dimensi beserta indikator dari Profesionalisme menurut Hanjoyo (2015) yaitu diantaranya :

1. Kreativitas (*Creativity*)

- a. Mengembangkan ide-ide atau masukan positif dalam menyelesaikan tugas yang diberikan oleh pimpinan
 - b. Bekerja dengan fleksibel yaitu tidak kaku dalam bekerja
 - c. Berinisiatif dalam menyelesaikan tugas tanpa menunggu perintah dari pimpinan
2. Inovasi (*Innovation*)
- a. Mengembangkan kualitas pribadinya
 - b. Berfikir secara sistematis dalam menyelesaikan tugas yang diberikan oleh pimpinan
 - c. Keinginan untuk berkembang melalui ilmu pengetahuan dan teknologi
3. Responsivitas (*Responsively*)
- a. Kondisi jasmani yang baik sehingga dapat bekerja secara gesit dalam menyelesaikan pekerjaan yang ditugaskan
 - b. Cepat tanggap dalam menanggapi permasalahan dan menyelesaikan tugas kesekretariatan oleh pegawai sekretariat
 - c. Mendatangkan solusi dalam menanggapi permasalahan dalam menyelesaikan tugas
4. Integritas
- a. Memiliki moral yang baik yaitu jujur dan bersih dari tindakan-tindakan tercela
5. Disiplin
- a. Taat terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku

6. Kompetensi

- a. Memiliki kemampuan atau pengetahuan atas bidang tugas masing-masing
- b. Bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas dengan benar, efektif, dan efisien.

2.9 Hubungan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Keuangan

Akuntabilitas adalah persyaratan kunci dalam *good governance*, dimana tidak hanya berlaku bagi instansi pemerintah, tetapi juga sektor pribadi dan organisasi dari masyarakat sipil dituntut untuk akuntabel ke publik dan kepada stakeholder lainnya. Akuntabilitas sebagai bentuk pertanggungjawaban bervariasi tergantung pada apakah keputusan atau tindakan yang diambil bersifat internal atau eksternal organisasi atau institusi tersebut. Akuntabilitas publik diperlukan karena aparatur pemerintah harus dapat mempertanggungjawabkan tindakan dan pekerjaannya kepada publik dan organisasi tempat kerjanya.

Akuntabilitas merupakan persyaratan mendasar untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan yang didelegasikan dan menjamin kewenangan tadi diarahkan pada pencapaian-pencapaian tujuan nasional yang diterima secara luas dengan tingkat efisiensi, efektifitas, kejujuran. Dengan adanya akuntabilitas tentunya akan mendorong kinerja instansi pemerintah bekerja dengan optimal dalam menjalankan program-program pemerintah serta dalam pengambilan kebijakan publik, karena instansi pemerintah harus mempertanggungjawabkan hasil kerjanya kepada publik. Kinerja adalah penampilan cara-cara untuk

menghasilkan suatu hasil yang diperoleh dengan aktivitas yang dicapai dengan suatu unjuk kerja.

2.10 Hubungan Transparansi Terhadap Kinerja Keuangan

Menurut Abdullah (2010) transparansi memiliki kedudukan penting dalam mengimplementasikan konsep *good governance*. Informasi yang mudah diakses dan mudah dipahami memberikan peluang kepada publik untuk berpartisipasi secara nyata dalam proses-proses yang berkaitan dengan kepentingan publik. Melalui transparansi penyelenggaraan pemerintah, masyarakat diberikan kesempatan untuk mengetahui apa-apa yang terjadi dalam pemerintahan, termasuk diantaranya kebijakan yang akan atau telah diambil oleh pemerintah, serta implementasi kebijakan tersebut.

Adanya keterbukaan dalam penyelenggaraan urusan publik akan memudahkan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Pengawasan dari masyarakat dapat mencegah terjadinya misalokasi sumber daya maupun berbagai pelanggaran dalam kegiatan pemerintah seperti korupsi. Rendahnya tingkat transparansi dalam bentuk kurangnya sosialisasi terhadap berbagai produk hukum akan membuat pelanggaran hukum meningkat karena masyarakat tidak mengetahui berbagai peraturan perundangan yang mengatur kehidupan mereka. Melalui transparansi, akan tercipta kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat karena masyarakat mengetahui apa-apa yang dilakukan oleh pemerintah (Asrida, 2012).

2.11 Profesionalisme Dalam Menguatkan atau Melemahkan Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Kinerja Keuangan

Akuntabilitas merupakan dorongan psikologi sosial yang dimiliki seseorang untuk mempertanggungjawabkan sesuatu yang telah mereka kerjakan kepada lingkungannya atau orang lain. Jika seorang akuntan menyadari akan betapa besar perannya bagi masyarakat dan bagi profesinya, maka ia akan memiliki sebuah keyakinan bahwa dengan melakukan pekerjaan dengan sebaik-baiknya, maka ia akan memberikan kontribusi yang sangat besar bagi masyarakat dan profesinya tersebut (Singgih dan Icut, 2010).

Seseorang dengan akuntabilitas tinggi memiliki keyakinan yang lebih tinggi bahwa pekerjaan mereka akan diperiksa oleh supervisor/manajer/pimpinan dibandingkan dengan seseorang yang memiliki akuntabilitas rendah. Kecermatan dan keseksamaan menekankan tanggung jawab setiap petugas audit yang bekerja pada suatu kantor akuntan publik. Kecermatan dan keseksamaan menyangkut apa yang dikerjakan auditor dan bagaimana kesempurnaan pekerjaannya itu. Jadi kecermatan dan keseksamaan merupakan tanggungjawab setiap auditor. Akuntabilitas (tanggungjawab) yang harus dimiliki auditor, yaitu : tanggungjawab kepada klien dan tanggungjawab rekan seprofesi.

2.12 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu sebelumnya sangatlah penting untuk dinyatakan karena dapat dipakai sebagai sumber informasi dan bahan acuan yang sangat berguna bagi penulis itu sendiri. Penelitian mengenai pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap kinerja keuangan telah dilakukan oleh peneliti terdahulu. Adapun persamaan dan perbedaan dengan penelitian terdahulu yang dapat dilihat pada tabel 2.1.

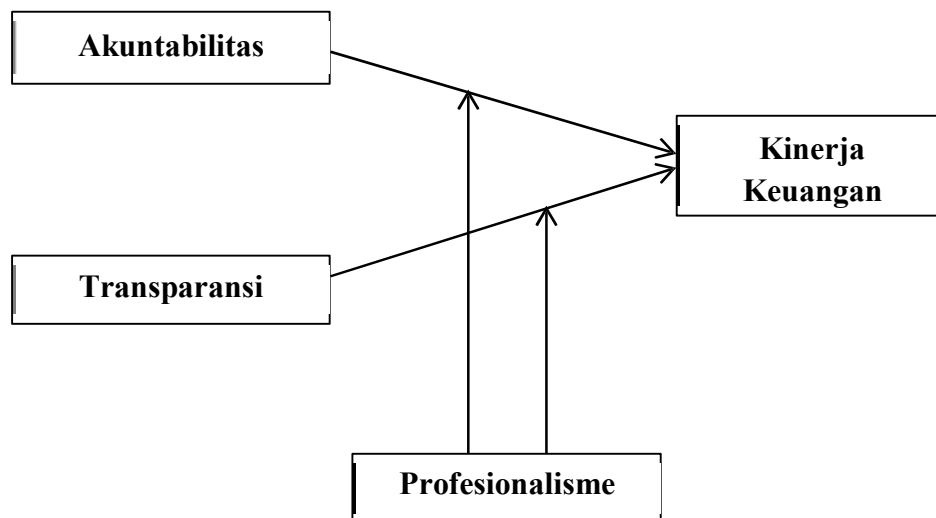
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
1.	Irna Setiyanningrum (2017)	Pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan terhadap kinerja anggaran dengan konsep <i>Value For Money</i> pada badan usaha milik daerah (BUMD) di Yogyakarta.	Independen : Akuntabilitas, Transparansi, Pengawasan Dependen : Kinerja anggaran dengan konsep Value For Money	Variabel akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja anggaran dengan konsep Value For Money (VFM) pada Badan usaha milik daerah (BUMD) di Yogyakarta tahun 2016.
2.	Nuzul Ibnu Hajar (2017)	Pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap kinerja pengelolaan anggaran pada UPTD Taman Budaya Sulawesi Tenggara.	Independen : Akuntabilitas, transparansi Dependen : Kinerja pengelolaan anggaran	Secara simultan variabel Transparansi (X1) dan Akuntabilitas (X2) berpengaruh signifikan terhadap kinerja pengelolaan anggaran(Y).
3.	Hanjoyo (2015)	Profesionalisme kerja pegawai sekretariat di kelurahan batu IX Kecamatan Tanjung Pinang Timur Kota Tanjung Pinang	Independen : Profesionalisme kerja pegawai	Pegawai sekretariat di Kelurahan Batu IX Kecamatan Tanjung Pinang Timur telah bekerja secara profesional

Sumber : Penelitian Terdahulu

2.13 Kerangka Konseptual

Good Governance adalah suatu penyelenggaraan negara yang mengarah kepada tujuan yang baik melalui perumusan kebijakan yang berhubungan dengan masalah-masalah sosial dan sistem nilai dalam operasi organisasi, yang berlaku bagi semua orang dibawah sistem demokrasi di Indonesia. Prinsip dari terwujudnya *good governance* itu sendiri yang paling penting yaitu akuntabilitas dan transparansi. Agar terbentuk transparansi dan akuntabilitas di pemerintahan maka diperlukan pengukuran kinerja pengelolaan keuangan yang dikuatkan oleh profesionalisme itu sendiri. Pengukuran kinerja disini digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan dan tujuan yang telah ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Adapun kerangka pikir sebagai berikut :



Gambar 2.1

Kerangka Konseptual

2.14 Hipotesis Penelitian

1. Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Kinerja Keuangan pada SKPD di Kota Makassar

Akuntabilitas merupakan satu unsur yang terpenting untuk mewujudkan suatu sistem pemerintahan yang bersih dan baik. Dengan adanya akuntabilitas tentunya akan mendorong dan meningkatkan kinerja instansi pemerintah bekerja dengan optimal dalam menjalankan program-program pemerintah serta dalam pengambilan kebijakan publik, serta dalam mengambil tindakan kebijakan-kebijakan dapat tepat sasaran dan mencapai tujuan dan disini instansi pemerintah sebagai pengambil kebijakan harus mempertanggungjawabkan hasil kerjanya tersebut kepada publik.

Ha1 : Diduga bahwa akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pada SKPD di Kota Makassar.

2. Pengaruh Transparansi Terhadap Kinerja Keuangan pada SKPD di Kota Makassar

Transparansi yang dilakukan pemerintah akan mendorong masyarakat berpartisipasi dalam pengambilan kebijakan pemerintah. Sehingga ada interaksi masyarakat dalam mengawasi serta menilai program-program pemerintah yang sudah atau belum terealisasi. Transparansi yang dilakukan pemerintah akan mendorong kinerja pemerintah bekerja dengan baik dalam pelaksanaan program-program pemerintah serta dalam pengambilan kebijakan publik. Jika transparansi dan akuntabilitas

terbentuk dalam kinerja instansi pemerintah dan telah dilaksanakan dengan baik, maka dapat dikatakan sebagai pemerintahan yang baik atau *good governance*.

Ha2 : Diduga bahwa transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pada SKPD di Kota Makassar.

3. Profesionalisme Dengan Memperkuat Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Kinerja Keuangan pada SKPD di Kota Makassar

Akuntabilitas berpengaruh terhadap kualitas audit yang menunjukkan bahwa akuntabilitas memiliki hubungan positif dengan kualitas hasil kerja auditor. Dengan akuntabilitas yang ditunjukkan oleh auditor selama proses audit maka diharapkan dapat mendukung kualitas audit yang baik dengan begitu kinerja instansi pemerintah juga hasilnya baik. Menurut Utama dan Setiyani (2014) transparansi menjadi sangat penting untuk meningkatkan reputasi dan kredibilitas organisasi maupun instansi pemerintah. Transparansi akan menguatkan perilaku etis dan profesional, sehingga stakeholder menjadi semakin percaya kepada keunggulan perusahaan atau pemerintah. Transparansi akan mencegah niat untuk melakukan korupsi, sehingga perusahaan atau pemerintah dapat beroperasi secara efektif dan efisien.

Ha3 : Diduga bahwa profesionalisme positif dapat memperkuat pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap kinerja keuangan pada SKPD di Kota Makassar.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam penyusunan proposal ini diperlukan data yang relevan dengan obyek yang diteliti. Dalam rangka pengumpulan data tersebut maka peneliti dalam hal ini mengadakan penelitian pada SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) di Kota Makassar, sedangkan waktu penelitian hingga perampungannya data ini dilaksanakan dari bulan Desember 2018 sampai pertengahan bulan Februari 2019.

3.2 Populasi dan Sampel

3.2.1 Populasi

Populasi adalah kelompok elemen yang lengkap, dimana kita tertarik untuk menjadi objek penelitian (Kuncoro, 2013:118). Dengan jumlah SKPD di Kota Makassar sebanyak 52 kantor SKPD. Akan tetapi, peneliti hanya mengambil 6 kantor SKPD yang dijadikan populasi dalam penelitian ini diantaranya terdiri dari 5 kantor dinas dan 1 kantor inspektorat sehingga jumlah keseluruhan pegawai pada bagian keuangan di 6 SKPD yang dijadikan populasi adalah 52 orang.

3.2.2 Sampel

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2011:85). Menurut Kuncoro (2013:118) Sampel adalah himpunan bagian dari unit populasi. Dalam penentuan sampel, teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan sampling jenuh. Sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota

populasi digunakan sebagai sampel. Istilah lain sampel jenuh adalah sensus, dimana semua yang menjadi bagian populasi dijadikan sampel (Sujarweni, 2016). Sehingga sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 35 responden yang merupakan pegawai bagian keuangan.

**Tabel 3.1 Daftar Nama Dinas dan Badan/Kantor Instansi
Pemerintah di Kota Makassar**

Nomor	Unit Satuan Kerja
1	Dinas Pekerjaan Umum : 7 responden
2	Dinas Pertanahan : 4 responden
3	Dinas Pendidikan : 8 responden
4	Dinas Peternakan : 5 responden
5	Inspektorat Kota Makassar : 2 responden
6	Dinas Perhubungan : 9 responden
	Total : 35 responden

Sumber : <https://bkpsdmd.makassar.go.id>

3.3 Metode Pengumpulan Data

Ada beberapa teknik yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data, yaitu sebagai berikut :

1. Observasi (Pengamatan)

Teknik observasi yaitu dilakukan dengan cara melakukan pengamatan secara langsung dalam proses pengolahan data kinerja keuangan pada bagian akuntabilitas dan transparansi di SKPD Kota Makassar.

2. Interview (Wawancara)

Teknik interview atau wawancara yang dilakukan secara langsung dengan kepala bagian keuangan kantor SKPD Kota Makassar, dan sejumlah personil lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

3. Kuesioner

Merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menyebarkan selebaran pernyataan yang diajukan kepada pegawai SKPD Kota Makassar yang menjadi sampel dalam penelitian ini. Pengukuran data kuesioner dengan teknik Skala Likert atau biasa dikenal dengan *summated ratings* yang pada umumnya menggunakan lima angka penilaian. Pertanyaan pada kuesioner dibuat dalam bentuk pilihan dan masing-masing item jawaban memiliki bobot skor yang berbeda. Adapun kategorinya sebagai berikut :

- a. Kategori Sangat Setuju (SS) diberi skor 5
- b. Kategori Setuju (S) diberi skor 4

- c. Kategori Netral (N) diberi skor 3
- d. Kategori Tidak Setuju (TS) diberi skor 2
- e. Kategori Sangat Tidak Setuju (STS) diberi skor 1

3.4 Jenis dan Sumber Data

Data adalah sekumpulan informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan (Kuncoro, 2013:145). Adapun jenis data yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Data kualitatif

Data kualitatif yaitu data yang diperoleh berupa keterangan-keterangan tertulis yang mendukung penelitian ini, seperti : Gambaran umum 6 Kantor SKPD Kota Makassar, Struktur organisasi dan uraian tugas masing-masing bagian.

2. Data kuantitatif

Data kuantitatif yaitu data yang berupa angka-angka yang dapat dihitung, seperti jumlah pegawai bagian keuangan serta data-data numerik lainnya baik yang telah diolah maupun belum diolah yang mendukung dalam melakukan penelitian ini.

Adapun sumber data yang diperoleh dari :

- 1. Data primer merupakan data yang diperoleh dengan survey lapangan yang menggunakan semua metode pengumpulan data original (Kuncoro, 2013:148). Data primer yaitu sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber yang ada dengan instrument berupa angket/kuesioner (Ardiyansyah dkk, 2016). Data primer yang dimaksud

dalam penelitian ini diperoleh melalui cara menyebarkan kuesioner kepada seluruh pegawai SKPD bagian keuangan.

2. Data sekunder, merupakan data yang telah dikumpulkan oleh lembaga pengumpul data dan dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data (Kuncoro, 2013:148). Sebagai suatu penelitian empiris maka data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui jurnal, buku, dan penelitian-penelitian terdahulu.

3.5 Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kuantitatif. Dalam penelitian ini, analisis kuantitatif dilakukan dengan cara mengkuantifikasi data-data penelitian sehingga menghasilkan informasi yang dibutuhkan dalam menganalisis. Dalam menganalisa data, digunakan pendekatan secara kuantitatif melalui analisa statistik. Peralatan Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda yaitu untuk menjawab permasalahan apakah variabel-variabel yang meliputi Akuntabilitas dan Transparansi baik secara parsial maupun simultan berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan dengan profesionalisme sebagai variabel moderating pada SKPD di Kota Makassar. Model penelitian pada pengujian hipotesis menggunakan pengujian parametrik. Pengujian ini menggunakan model persamaan multiple regresi. Adapun metode analisis yang digunakan adalah :

1. Uji Instrumen Penelitian

a. Uji Validitas

Uji Validitas digunakan untuk mengukur valid atau tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan dalam kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang diukur kuesioner tersebut (Ghozali, 2013). Pengujian validitas dapat dilakukan dengan bantuan program SPSS versi 24. Pengujian suatu data dapat dinyatakan valid apabila $\alpha >$

b. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah sebenarnya alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau *construct*. Suatu kuesioner dikatakan *reliable* atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 2013). Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan SPSS. Uji realibilitas data dapat dilakukan dengan uji statistic *Cronbach Alpha* (Suatu variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronbach Alpha* $> 0,60$.

2. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik terhadap model regresi yang digunakan, dilakukan agar dapat diketahui apakah model regresi tersebut merupakan model regresi yang baik atau tidak (Ghozali, 2013). Dalam penelitian ini uji asumsi klasik yang digunakan adalah uji normalitas, uji multikolinieritas, uji autokorelasi dan uji heteroskedastisitas.

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji ada tidaknya variabel pengganggu atau residual mempunyai distribusi normal dalam model regresi. Uji normalitas dilakukan untuk meyakinkan bahwa variabel yang dibandingkan rata-ratanya mengikuti sebaran atau distribusi normal. Dalam penelitian ini, teknik uji normalitas yang digunakan adalah analisis grafik dan *one sampel kolmogorov smirnov test*. Pada prinsipnya normalitas dengan analisis grafik dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik atau melihat histogram dari residualnya. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. *One sampel kolmogorov smirnov test* yaitu pengujian dua sisi yang dilakukan dengan membandingkan signifikansi hasil uji (p value) dengan taraf signifikan 10%. Apabila signifikansi data lebih dari 10%, maka data dapat dikatakan normal. Apabila signifikansi data kurang dari 10%, maka data dikatakan tidak normal (Imam Ghazali, 2011: 160).

b. Uji Multikolinearitas

Uji ini untuk melihat variabel independen yang satu dengan yang lain dalam model regresi linier berganda tidak saling berhubungan secara sempurna. Untuk mengetahui ada tidaknya gejala multikolinearitas dapat dilihat dari besarnya nilai Tolerance dan VIF (*Variance Inflation Factor*) melalui program SPSS. *Tolerance* mengukur variabilitas variabel terpilih

yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Nilai umum yang biasa dipakai adalah nilai *Tolerance* > 1 atau nilai VIF < 5, maka tidak terjadi multikolinearitas (Situmorang, 2010:153).

c. Uji Heteroskedastisitas

Adanya varians variabel independen adalah konstan untuk setiap nilai tertentu variabel independen (Homokedastisitas). Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas, atau terjadi homoskedastisitas. Heteroskedastisitas diuji dengan menggunakan uji *Scatterplot* dengan pengambilan keputusan jika di mana tidak terjadi heteroskedastisitas apabila titik-titik menyebar secara acak, tidak membentuk sebuah pola tertentu yang jelas, dan tersebar baik di atas maupun di bawah angka nol pada sumbu Y.

d. Uji Autokorelasi

Autokorelasi merupakan salah satu dari uji asumsi klasik yang digunakan untuk mengetahui apakah dalam suatu model regresi linear terdapat korelasi antar kesalahan pengganggu dengan periode t dengan kesalahan periode $t-1$ yang berarti kondisi saat ini dipengaruhi oleh kondisi sebelumnya dengan kata lain auto korelasi sering terjadi pada data time series. Data yang baik adalah data yang tidak terdapat auto korelasi di dalamnya.

Autokorelasi terbagi dua, ada autokorelasi positif dan ada autokorelasi salah autokorelasi ini merupakan masalah *error*, jadi kedua jenis autokorelasi di atas juga akan terkait masalah *error*. Autokorelasi positif

adalah autokorelasi dimana error yang selalu diikuti oleh *error* yang sama tandanya, misalnya ketika satu periode sebelumnya positif maka *error* berikutnya akan positif. Sebaliknya, autokorelasi negative menyebabkan *error* akan diikuti oleh *error* yang berbeda tanda, misalnya ketika *error*nya positif maka akan diikuti oleh *error* negative pada periode selanjutnya.

3. Analisis kuantitatif yaitu suatu analisis dengan menggunakan alat regresi linier berganda dan analisis *moderated regression* analisis dengan menggunakan rumus yang dikemukakan oleh Suntoyo (2012:204) sebagai berikut :

a. Analisis Regresi Linear Berganda

Pengujian hipotesis 1 dan 2 menggunakan alat analisis regresi berganda. Penggunaan regresi ini dimaksudkan untuk mengetahui secara terpisah (parsial) berbagai variabel independen yang ada tanpa ada pengaruh unsur variabel lain. Persamaan regresi berganda :

$$Y = a + \quad + \quad + e$$

Keterangan :

- a** = **Konstanta**
- Y** = **Kinerja Keuangan**
- = **Akuntabilitas**
- = **Transparansi**

b. Analisis Moderated Regression Analysis

Analisis Moderated Regression Analysis (MRA) atau uji interaksi merupakan aplikasi khusus regresi linear berganda dimana dalam persamaan regresinya mengandung unsur interaksi (perkalian dua atau lebih variabel independen). Dalam penelitian ini, analisis MRA digunakan untuk menguji Hipotesis 3. Analisis moderat digunakan untuk menaksir nilai variabel Y berdasarkan nilai variabel X dikalikan dengan variabel Y untuk setiap satuan perubahan variabel X yang dikalikan dengan variabel Z.

Persamaan yang digunakan adalah :

$$Y = a + \quad + \quad + \quad + \quad + e$$

Keterangan :

- Y** = **Kinerja Keuangan**
- = **Akuntabilitas**
- = **Transparansi**
- = **Profesionalisme**
- = **Interaksi antara akuntabilitas dan profesionalisme**
- = **Interaksi antara transparansi dan profesionalisme**

4. Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui presentase perubahan variabel tidak bebas (Y) yang disebabkan oleh variabel bebasnya (X). Pada intinya koefisien determinasi mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen.

5. Pengujian Hipotesis

a. Uji hipotesis menggunakan uji F

Uji F adalah untuk mengetahui hubungan antara X dan Y apakah variabel X1,X2,X3 benar-benar berpengaruh secara simultan terhadap variabel Y.

Uji F digunakan untuk mengetahui signifikansi pengaruh variabel bebas X1,X2,X3 terhadap variabel terikat Y secara bersamaan. Pengujian ini dilakukan beberapa langkah sebagai berikut :

Membuat hipotesis

- a) H_0 : tidak ada pengaruh yang signifikan secara simultan pada masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat.
- b) H_a : ada pengaruh yang signifikan secara simultan pada masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat.

Menentukan F table dan F hitung

- c) F table dengan signifikansi sebesar 5%
- d) F hitung di dapat dari perhitungan computer

Pengambilan keputusan berdasarkan nilai F

- e) Bila $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima
- f) Bila $F_{hitung} < F_{tabel}$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak

Pengambilan keputusan berdasarkan nilai F

- g) Bila probabilitas $< 0,005$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima
- h) Bila probabilitas $> 0,005$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak

b. Uji hipotesis menggunakan Uji-t

Uji t dimaksudkan untuk melihat apakah secara individu variabel bebas mempunyai pengaruh terhadap variabel tidak bebas, dengan asumsi variabel bebas lainnya konstan. Uji t digunakan untuk uji signifikan pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y). Apakah variabel X_1, X_2, X_3 berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Y yaitu kualitas secara terpisah. Pengujian ini dilakukan beberapa langkah sebagai berikut :

Membuat hipotesis

- i) : tidak ada pengaruh yang signifikan secara parsial pada masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat.
- j) : ada pengaruh yang signifikan secara parsial pada masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat.

Menentukan t tabel dan t hitung

- k) t tabel dengan signifikansi sebesar 5%
- l) t hitung di dapat dari perhitungan komputer

Pengambilan keputusan berdasarkan nilai t

- m) Bila t hitung $>$ t tabel maka ditolak dan diterima
- n) Bila t hitung $<$ t tabel maka diterima dan ditolak

Pengambilan keputusan berdasarkan probabilitas

- o) Bila probabilitas $<$ 0,005 maka ditolak dan diterima
- p) Bila probabilitas $>$ 0,005 maka diterima dan ditolak

3.6 Definisi Operasional Variabel

Variabel adalah sesuatu yang dapat membedakan atau mengubah nilai (Kuncoro, 2013:49). Secara umum penelitian ini terdiri dari dua jenis variabel yang meliputi :

1. Variabel Bebas (Variabel Independen)

Merupakan variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen atau terikat (Sugiyono, 2011: 39). Variabel bebas (X) untuk penelitian ini adalah :

a. Akuntabilitas (X1)

Akuntabilitas yang dimaksud dalam penelitian ini adalah salah satu prinsip yang mendukung terciptanya serta terselenggaranya *good governance* (pemerintahan yang baik) yang dimana akuntabilitas ini merupakan sebuah pertanggungjawaban yang akan diminta pertanggungjawabannya nanti oleh pihak yang memberi tugas atau dalam artian memberi mandat kepada pihak yang diberi tugas atau mandat. Akuntabilitas dapat diukur melalui beberapa indikator yaitu :

1. Kepatuhan terhadap hukum
2. Penghindaran korupsi dan kolusi
3. Adanya kepatuhan terhadap prosedur
4. Adanya pelayanan publik yang cermat
5. Adanya pelayanan publik yang murah
6. Adanya pengawasan terhadap pertanggungjawaban anggaran
7. Mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah diambil

8. Keterbukaan kepada media massa terhadap akses publik (Lalolo, 2003).

b. Transparansi (X2)

Transparansi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah keterbukaan dan kejujuran seorang pegawai untuk diketahui secara terbuka dan menyeluruh serta bebas oleh publik atas apa yang telah diselenggarakan dan dilaksanakan termasuk informasi pengelolaan keuangan dan proses pembuatan serta pelaksanaannya atas hasil yang dicapai. Transparansi dapat diukur melalui beberapa indikator yaitu :

1. Informasi yang disampaikan akurat dan jelas
2. Merespon dengan cepat setiap pengaduan yang diajukan
3. Adanya kebebasan kepada setiap pegawai terhadap informasi
4. Mengutamakan kepentingan publik dan golongan
5. Melaporkan pertanggungjawaban keuangan setiap tahun
6. Adanya kerjasama yang baik antara pemerintah dan media massa
7. Memberikan akses yang mudah kepada pemangku kepentingan (*stakeholder*) terhadap dokumen RAPBD (Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah)
8. Adanya pembagian peran dan tanggungjawab yang jelas
9. Diterapkannya E-budgeting
10. Adanya pengawasan terhadap perancangan anggaran (Andrianto, 2007:21).

2. Variabel Terikat (Variabel Dependen)

Menurut Sugiyono (2011: 39), “Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas”. Variabel terikat (Y) untuk penelitian ini adalah kinerja dikuatkan dengan profesionalisme sumber daya manusia. Kinerja adalah suatu kegiatan atau pekerjaan yang bertujuan untuk mencapai hasil yang diharapkan. Gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/ program / kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan strategis suatu organisasi Instansi Pemerintah. Kinerja dapat diukur melalui beberapa indikator yaitu :

- (a) *economy* atau ekonomis adalah penggunaan sumber daya sesedikit mungkin dalam proses penyelenggaraan pelayanan publik
- (b) *efficiency* atau efisiensi adalah suatu keadaan yang menunjukkan tercapainya perbandingan terbaik antara masukan dan keluaran dalam penyelenggaraan pelayanan publik
- (c) *effectiveness* atau efektivitas adalah tercapainya tujuan yang telah ditetapkan, baik itu dalam bentuk target, sasaran jangka panjang maupun misi organisasi
- (d) *equity* atau keadilan adalah pelayanan publik yang diselenggarakan dengan memperhatikan aspek-aspek pemerataan (Januari dkk., 2015).
- (e) *evaluation* atau evaluasi yaitu melakukan evaluasi terhadap setiap tindakan yang dilakukan.

3. Variabel Moderating (*Moderating Variable*)

a. Profesionalisme (X3)

Profesionalisme merupakan sebuah perilaku, cara dan kualitas pegawai yang menjadi ciri suatu profesi seorang pegawai. Seseorang dikatakan profesional apabila pekerjaannya memiliki ciri standar teknis atau etika suatu profesi dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya. Adapun indikator dari profesionalisme yaitu :

1. Kreativitas (*Creativity*)

- a) Mengembangkan ide-ide atau masukan positif dalam menyelesaikan tugas yang diberikan oleh pimpinan

2. Inovasi (*Innovation*)

- a) Mengembangkan kualitas pribadinya
- b) Berfikir secara sistematis dalam menyelesaikan tugas yang diberikan oleh pimpinan

3. Responsivitas (*Responsively*)

- a) Cepat tanggap dalam menanggapi permasalahan dan menyelesaikan tugas kesekretariatan oleh pegawai sekretariat
- b) Mendatangkan solusi dalam menanggapi permasalahan dalam menyelesaikan tugas (Hanjoyo, 2015).

4. Integritas

- a) Memiliki moral yang baik yaitu jujur dan bersih dari tindakan-tindakan tercela

5. Disiplin

- a) Taat terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku

6. Kompetensi

- a) Memiliki kemampuan atau pengetahuan atas bidang tugas masing-masing
- b) Bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas dengan benar, efektif dan efisien.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Perusahaan

4.1.1 Sejarah Singkat SKPD Kota Makassar

SKPD Kota Makassar merupakan salah satu dari dua subsistem dalam sistem pemerintah daerah yang melaksanakan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut, SKPD diberikan kuasa untuk menggunakan alokasi dana (anggaran) dan barang atau aset yang dibutuhkan. Pelimpahan kuasa tersebut tidak hanya berisi hak untuk menggunakan dana, namun juga berimplikasi pada sisi kewajiban, yaitu SKPD wajib mewujudkan target kinerja dari usulan kegiatan di anggarannya. Dana publik yang menjadi hak SKPD tidak dikeluarkan tanpa suatu tujuan, namun ada target kinerja yang harus diwujudkan. Terkait dengan informasi keuangan, SKPD harus selalu mengetahui berapa dana publik yang telah masuk, berapa dana yang telah digunakan dan berapa dana yang belum digunakan. Bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan dana publik tersebut bukanlah SPJ (Surat Pertanggungjawaban), tetapi berupa laporan keuangan. Dengan demikian, SKPD disebut sebagai entitas akuntansi (*accounting entity*). SKPD sebagai entitas akuntansi (*accounting entity*) harus melaksanakan proses akuntansi untuk menyusun laporan keuangan yang akan disampaikan kepada kepala daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan.

Laporan keuangan merupakan hal yang bagus dari badan atau instansi pemerintah. Menurut Iswahyudi dkk, (2016) publik dapat mengetahui dari mana sumber uang instansi dan kemana uang itu dibelanjakan dan berapa sisanya (tujuan dari laporan arus kas) karena uang instansi tersebut adalah uang rakyat. Dalam penelitian ini peneliti meneliti di 6 kantor SKPD yang ada di Kota Makassar yaitu Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pendidikan, Inspektorat Kota Makassar, Dinas Perhubungan, Dinas Pertanahan dan Dinas Peternakan. Kuesioner dibagikan ke setiap kantor SKPD tersebut tetapi hanya pegawai bagian keuangannya saja. Berikut masing-masing penjelasan profil dan visi misi dari setiap SKPD :

1. Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar

Dinas Pekerjaan Umum terletak di Jalan Urip Sumoharjo No.8, Makassar. Dinas Pekerjaan Umum atau yang biasa disingkat dengan PU mempunyai tugas pokok yaitu merumuskan, membina, dan mengendalikan kebijakan di bidang pekerjaan umum, pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan, sarana dan prasarana lingkungan, termasuk trotoar, penerangan jalan, drainase dan sungai di Kota Makassar.

a. Visi Dinas PU :

“Mewujudkan Infrastruktur ke PU-an yang berkualitas dan berkearifan lokal”.

b. Misi Dinas PU :

1. Mengembangkan penanganan pembangunan jalan dan jembatan yang berkualitas dan berhasil guna

2. Meningkatkan pembangunan bangunan air terpadu didukung sistem informasi database untuk pelayanan yang berkesinambungan
3. Mewujudkan pemenuhan kebutuhan prasarana lingkungan air bersih dan sanitasi untuk penyehatan lingkungan pemukiman
4. Mengembangkan kualitas manajemen kelembagaan berbasis e-government yang akuntabilitas dan sinergi dengan sektor lain dalam menghadapi pasar global.

2. Dinas Perhubungan Kota Makassar

Dinas Perhubungan terletak di Jalan Malengkeri No. 18, Makassar. Dinas Perhubungan atau biasa disingkat Dishub mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan atau transportasi yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah. Untuk wewenang, Dishub memiliki wewenang untuk memberikan izin persuratan terkait transportasi dan perhubungan serta penyelenggaraan administrasi termasuk perizinan angkutan perhubungan.

a. Visi Dishub :

“Dinas Perhubungan sebagai penyelenggara transportasi yang professional dan handal menuju tercapainya simpul konektivitas di kawasan timur Indonesia”.

b. Misi Dishub :

1. Menyediakan sarana dan prasarana perhubungan sesuai kebutuhan
2. Menciptakan sistem pelayanan transportasi yang selamat, aman, nyaman dan terjangkau

3. Memberdayakan masyarakat untuk ikut serta dalam mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban transportasi
4. Mengembangkan kemampuan sumber daya manusia agar mampu melaksanakan tugas secara profesional.

3. Dinas Pertanahan Kota Makassar

Dinas Pertanahan terletak di Jalan Ahmad Yani, Makassar tepatnya di dalam gedung kantor balaikota lantai 7. Dinas Pertanahan bertugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanahan yang menjadi kewenangan Daerah dan merumuskan serta melaksanakan kebijakan di bidang pertanahan.

a. Visi Dinas Pertanahan :

“Terciptanya system administrasi tanah aset Pemerintah Kota Makassar yang aman dan transparansi”.

b. Misi Dinas Pertanahan :

1. Menata, memanfaatkan dan mengamankan aset Pemerintah Kota Makassar
2. Meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur menjadi aparatur yang handal dan professional
3. Penggunaan aplikasi teknologi untuk pelayanan informasi.

4. Dinas Pendidikan Kota Makassar

Dinas Pendidikan terletak di Jalan Letjen Hertasning, Makassar. Dinas Pendidikan sebagai penyelenggaraan dan penanggungjawab operasional pendidikan dengan tugas pokok merumuskan, membina dan mengendalikan di

bidang pendidikan yang meliputi pendidikan dasar dan menengah, pendidikan non formal dan informal serta pengembangan sarana dan prasarana pendidikan di Kota Makassar.

a. Visi Dinas Pendidikan :

“Mewujudkan Pendidikan yang berwawasan global, inovatif, berkarakter dan religius”.

b. Misi Dinas Pendidikan :

1. Menyediakan deposito pendidikan gratis bagi siswa dari keluarga prasejahtera
2. Menjamin kesetaraan dan ketersediaan akses layanan pendidikan yang bermutu dan terjangkau
3. Meningkatkan kualitas proses pembelajaran berbasis e-learning yang merujuk pada perkembangan global
4. Mewujudkan kelestarian dan memperkuat kebudayaan lokal
5. Menjamin penyelenggaraan pendidikan yang transparan dan akuntabel.
6. Meningkatkan kompetensi tenaga-tenaga pendidik untuk menjamin relevansi iuran pendidikan dengan kebutuhan masyarakat
7. Menjamin keterlaksanaan program pendidikan universal dan program pendidikan orang dewasa
8. Menjamin keterlaksanaan kurikulum yang holistik berlandaskan nilai-nilai keagamaan, moral dan karakter bangsa.

5. Dinas Peternakan Kota Makassar

Dinas Peternakan terletak di Jalan Bajiminasa No.14, Makassar. Dinas Peternakan ini merupakan salah satu bidang yang ada pada Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar yang mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan di bidang peternakan dan kesehatan hewan.

1. Visi Dinas Peternakan :

“Makassar sebagai *Waterfront City* menjadi pilar dalam konservasi sumber daya alam melalui peningkatan peran nelayan, petani, peternak dalam ketersediaan pangan dan ruang hijau kota yang nyaman untuk semua”.

2. Misi Dinas Peternakan :

1. Mengkonservasi sumber daya alam dalam upaya mitigasi bencana di wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil Kota Makassar
2. Meningkatkan produktivitas dan peran nelayan, petani serta peternak dalam ketersediaan dan keamanan pangan di Kota Makassar
3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan penyuluh serta kelompok nelayan, petani, dan peternak.
4. Meningkatkan nilai fungsi ruang publik dengan menata wilayah pesisir dan kawasan lainnya menjadi kawasan hijau yang nyaman bagi semua.

6. Inspektorat Kota Makassar

Inspektorat Kota Makassar terletak di Jalan Teduh Bersinar No.7, Makassar. Inspektorat bertugas membantu Walikota membina dan

mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah.

1. Visi Inspektorat Kota Makassar :

“Penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan berwibawa melalui pengawasan yang efektif dan profesional”.

2. Misi Inspektorat Kota Makassar :

“Terwujudnya pengawasan internal Pemerintah Kota Makassar yang efektif”.

4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Karakteristik Responden

Responden dari penelitian ini adalah staf pegawai bagian keuangan pada 6 SKPD di Kota Makassar. Adapun pertanyaan yang termuat dalam kuesioner terdiri dari dua bagian, yaitu pertanyaan mengenai identitas responden dan pertanyaan mengenai variabel independen yaitu akuntabilitas, transparansi dan profesionalisme. Rincian pembagian kuesioner pada setiap SKPD yaitu pada Dinas Pekerjaan Umum terdapat 7 responden, Dinas Pertanahan terdapat 5 responden, Dinas Pendidikan terdapat 10 responden, Dinas Peternakan terdapat 5 responden, Dinas Perhubungan terdapat 6 responden dan Inspektorat Kota Makassar terdapat 2 responden. Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai identitas responden berdasarkan jenis kelamin, umur, pendidikan, lama bekerja, dan pendapatan. Penggolongan yang dilakukan terhadap responden dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara jelas objek penelitian. Gambaran umum objek penelitian tersebut satu per satu dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Jenis Kelamin

Deskripsi identitas responden berdasarkan jenis kelamin, menunjukkan bahwa responden yang berjenis kelamin perempuan sebesar 18 orang atau 48,6% dan yang berjenis kelamin laki-laki sebesar 17 orang atau 51,4%. Jadi staf pegawai bagian keuangan pada 6 SKPD di Kota Makassar lebih dominan perempuan terlihat pada tabel 4.1.

Tabel 4.1
Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
Laki-Laki	17	48,6%
Perempuan	18	51,4%
Total	35	100%

Sumber : Data Primer.2019

Berdasarkan tabel 4.1 menunjukkan bahwa jumlah responden perempuan lebih dominan 18 orang atau sebesar 51,4 % dibanding laki – laki. Artinya perempuan itu lebih di utamakan pada bagian – bagian perkantoran, sedangkan kaum laki – laki lebih di utamakan pada bagian-bagian operasional yang bersifat menantang.

b. Usia

Pada kategori usia ini terdapat 35 responden yang dijadikan responden dalam penelitian ini, responden yang berusia 23-35 tahun sebanyak 7 orang atau 20%, responden dengan usia 36-45 tahun sebanyak 42,9%, responden dengan usia 46-55 tahun sebanyak 7 orang atau 20%, dan responden yang berusia >56 tahun

sebanyak 6 orang atau 17,1%. Sehingga responden terbanyak berusia 36-45 tahun yakni 15 orang seperti tabel dibawah ini :

Tabel 4.2
Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Usia	Frekuensi	Persentase
23-35 TAHUN	7	20%
36-45 TAHUN	15	42,9%
46-55 TAHUN	7	20%
> 56 TAHUN	6	17,1%
Total	35	100%

Sumber : Data Primer. 2019.

Berdasarkan tabel 4.2 diatas menunjukkan bahwa usia 36 – 45 tahun atau sebesar 42,9 % lebih dominan memiliki pekerjaan dibanding usia diatas 46-55 s/d 56 tahun. Artinya usia 36–45 adalah usia yang bisa dibentuk dan didik menjadi pegawai yang professional dibidang pekerjaannya masing – masing.

c. Pendidikan

Dari tabel 4.3 menunjukkan bahwa dari 35 orang yang dijadikan responden dalam penelitian ini, responden yang berpendidikan SMA sebanyak 9 orang atau 25,7%, responden yang berpendidikan S1 sebanyak 19 orang atau 54,3%, dan responden yang berpendidikan S2 sebanyak 7 orang atau 20%. Sehingga responden dalam penelitian ini lebih dominan berpendidikan terakhir S1. Pendidikan S1 merupakan pendidikan yang paling banyak dibutuhkan di instansi pemerintahan.

Tabel 4.3
Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan

Pendidikan	Jumlah	Persentase
SMA	9	25,7%
S1	19	54,3%
S2	7	20,0%
Total	35	100%

Sumber : Data Primer.2019.

d. Lama Bekerja

Dari tabel 4.4 menunjukkan bahwa dari 35 orang yang dijadikan responden dalam penelitian ini, responden yang telah bekerja selama < 2 tahun sebanyak 8 orang atau 16%, responden yang telah bekerja selama < 3 tahun sebanyak 13 orang atau 26%, dan responden yang bekerja > 6 tahun sebanyak 14 orang atau 28%. Sehingga dalam penelitian ini responden yang bekerja selama >6 tahun yang paling dominan. Intansi penerimaan pegawai SKPD dilakukan dengan sistem seleksi CPNS. Sehingga dalam penelitian ini terbanyak lama bekerja >6 tahun sebab dalam instansi jarang ada karyawan yang keluar sebab sudah terikat sebagai PNS.

Tabel 4.4
Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Bekerja

Lama Bekerja	Jumlah	Persentase
< 2 TAHUN	8	22.9%
< 3 TAHUN	13	37.1%
> 6 TAHUN	14	40%
Total	35	100%

Sumber : Data Primer.2019.

Berdasarkan tabel 4.4 menunjukkan bahwa jumlah responden sebanyak 14 responden sudah bekerja selama 6 tahun atau sebesar 40,0%, sedangkan sisanya lamanya bekerja masing – masing 2 s/d 3 tahun. Artinya responden tersebut sudah memiliki ketrampilan dan pengalaman yang memadai untuk mengembang tugas sebagai abdi Negara yang siap bekerja untuk melayani rakyat.

e. Pendapatan

Dari tabel 4.5 menunjukkan bahwa dari 35 responden yang dijadikan responden dalam penelitian ini, responden dengan pendapatan < Rp2.000.000 sebanyak 4 orang atau 11,4%, responden dengan pendapatan Rp2.000.000-Rp4.000.000 sebanyak 13 orang atau 37,1%, responden dengan pendapatan Rp4.000.000-Rp6.000.000 sebanyak 12 orang atau 34,3%, dan responden yang berpendapatan Rp8.000.000 sebanyak 6 orang atau 17,1%. Sehingga responden dalam penelitian ini didominasi oleh responden yang berpendapatan Rp2.000.000-Rp4.000.000 perbulan.

Tabel 4.5
Karakteristik Responden Berdasarkan Pendapatan

Pendapatan	Jumlah	Persentase
< Rp 2.000.000	4	11.4
Rp 2.000.000-Rp 4.000.000	13	37.1
Rp 4.000.000-Rp 6.000.000	12	34.3
Rp 8.000.000	6	17.1
Total	35	100.0

Sumber : Data Primer, 2019.

Berdasarkan tabel 4.5 menunjukkan bahwa karakteristik responden berdasarkan pendapatan, berjumlah 13 orang reponden berpendapatan sebesar Rp 2.000.000, – Rp. 4.000.000,- atau sebesar 37,1%. Artinya pendapatan Rp. 2.000.000, – Rp. 4.000.000,- tersebut rata – rata sudah bekerja selama 3 tahun. Pegawai yang bekerja selama 3 tahun lebih mengalami kenaikan gaji sesuai golongan.

4.2.2 Deskriptif Statistik

Tabel 4.6
Deskriptif Variabel

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
AKUNTABILITAS	35	2,44	4,00	3,3303	0,41915
TRANSPARANSI	35	2,67	4,00	3,2517	0,36691
PROFESIONALISME	35	5,67	16,00	11,4123	2,66814
KINERJA KEUANGAN	35	7,47	16,00	11,3737	2,32450
Valid N (listwise)	35				

Sumber : Data Primer diolah SPSS, Tahun 2019.

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa variabel akuntabilitas dengan skor terendah (minimum) sebesar 2,4 dan skor jawaban tertinggi (maksimum) sebesar 4. Rata-rata skor jawaban dari variabel tersebut adalah 3,3 dan standar deviasi 0,41 sehingga standar deviasi lebih kecil dari nilai rata-rata. Hal ini mengindikasikan bahwa sebaran data akan persepsi responden terhadap akuntabilitas dinyatakan baik dan dapat digunakan sebagai penjas bagaimana kinerja keuangan.

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa variabel transparansi dengan skor terendah (minimum) sebesar 2,67 dan skor jawaban tertinggi (maksimum) sebesar 4. Rata-rata skor jawaban dari variabel tersebut adalah 3,2 dan standar

deviasi 0,36 sehingga standar deviasi lebih kecil dari nilai rata-rata. Hal ini mengindikasikan bahwa sebaran data akan persepsi responden terhadap profesionalitas dinyatakan baik dan dapat digunakan sebagai penjelas bagaimana kinerja keuangan.

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa variabel profesionalisme dengan skor terendah (minimum) sebesar 5,6 dan skor jawaban tertinggi (maksimum) sebesar 16. Rata-rata skor jawaban dari variabel tersebut adalah 11,4 dan standar deviasi 2,6 sehingga standar deviasi lebih kecil dari nilai rata-rata. Hal ini mengindikasikan bahwa sebaran data akan persepsi responden terhadap profesionalisme dinyatakan baik dan dapat digunakan sebagai penjelas bagaimana kinerja keuangan.

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa variabel kinerja keuangan dengan skor terendah (minimum) sebesar 7,47 dan skor jawaban tertinggi (maksimum) sebesar 16. Rata-rata skor jawaban dari variabel tersebut adalah 11,4 dan standar deviasi 2,66 sehingga standar deviasi lebih kecil dari nilai rata-rata. Hal ini mengindikasikan bahwa sebaran data akan persepsi responden terhadap kinerja keuangan dinyatakan baik.

4.2.3 Tanggapan Responden

a. Tanggapan Responden Mengenai Akuntabilitas

Pada tanggapan responden mengenai akuntabilitas terdapat 8 pernyataan yang diberikan dan jawaban yang ada bervariasi serta terdapat 1 responden yang memilih kategori sangat tidak setuju pada pernyataan ke-7.

Tabel 4.7
Tanggapan responden Mengenai Akuntabilitas

No	Akuntabilitas	SS		S		N		TS		STS		Total	
		R	%	R	%	R	%	R	%	R	%	R	%
1.	Pertanggungjawaban anggaran berdasarkan ketentuan hukum dan undang-undang yang berlaku	0	0	23	65,7	10	28,6	2	5,7	0	0	35	100
2.	Menghindari segala resiko yang timbul akibat adanya korupsi dan kolusi pada SKPD DI KOTA MAKASSAR ini	0	0	16	45,7	17	48,6	2	5,7	0	0	35	100
3.	Pekerjaan yang dilakukan dengan standar prosedur yang telah ditetapkan	0	0	16	45,7	14	40,0	5	14,3	0	0	35	100
4.	Mencermati segala sesuatu yang berhubungan dengan dokumen maupun data yang diserahkan pada SKPD DI KOTA MAKASSAR ini	0	0	17	48,6	13	37,1	5	14,3	0	0	35	100
5.	Pelayanan yang diberikan tidak dipungut biaya (gratis) ditanggung oleh kantor SKPD DI KOTA MAKASSAR	0	0	17	48,6	15	42,9	3	8,6	0	0	35	100
6.	Proses dan pertanggungjawaban anggaran diawasi terus-menerus	0	0	14	40,0	18	51,4	3	8,6	0	0	35	100
7.	Proses anggaran dipertanggungjawabkan otoritas yang lebih tinggi	0	0	17	48,6	15	42,9	2	5,7	1	2,9	35	100
8.	Informasi yang telah dibuat mengenai suatu keputusan disebarluaskan melalui media massa akses publik	0	0	12	34,3	16	45,7	7	20,0	0	0	35	100

Sumber: Data Primer diolah SPSS, Tahun 2019

Berdasarkan tanggapan responden mengenai variabel akuntabilitas, maka rata rata responden memberikan jawaban setuju dan sangat setuju. Meskipun ada beberapa yang memberikan jawaban netral, tidak setuju, dan sangat tidak setuju pada pernyataan ke-7.

Responden banyak menjawab setuju pada pernyataan pertama yang mana berdasarkan hasil jawaban tersebut responden menganggap akuntabilitas harus

berdasarkan ketentuan hukum dan undang-undang yang berlaku. Responden banyak yang memberikan jawaban netral pada pernyataan ke-enam yang mana responden menganggap bahwa proses dan pertanggung jawaban anggaran tidak diawasi terus-menerus pada SKPDnya mereka. Dan responden yang memberikan jawaban tidak setuju paling banyak pada pernyataan ketiga. Hal ini membuktikan pekerjaan pada SKPD dianggap tidak dilakukan dengan standar prosedur yang telah ditetapkan.

b. Tanggapan Responden Mengenai Transparansi

Pada tanggapan responden mengenai transparansi terdapat 10 pernyataan yang diberikan dan jawaban yang diberikan juga bervariasi. Berdasarkan tanggapan responden mengenai variabel transparansi, maka rata-rata responden memberikan jawaban setuju dan sangat setuju. Meskipun ada 2 responden yang memberikan jawaban tidak setuju pada pernyataan terakhir. Lihat pada tabel 4.8.

Responden memberikan jawaban sangat setuju karena transparansi dilakukan dengan kerja sama yang baik terjalin sejak lama dengan non Pemerintah dan media massa pengelolaan informasi. Sedangkan responden yang menjawab tidak setuju disebabkan pelaporan pertanggung jawaban keuangan setiap tahun tidak tepat waktu. Dan responden yang memberi jawaban tidak setuju karena informasi yang disampaikan kurang akurat dan kurang jelas terhadap anggaran yang dikelola.

Tabel 4.8
Tanggapan responden Mengenai Transparansi

No	Transparansi	SS		S		N		TS		STS		Total	
		R	%	R	%	R	%	R	%	R	%	R	%
1.	Informasi yang disampaikan sangat akurat dan jelas terhadap anggaran yang dikelola	0	0	18	51,4	12	34,3	5	14,3	0	0	35	100
2.	Setiap pengaduan yang diajukan oleh individu dirspn dengan cepat dan dapat dipertanggungjawabkan	0	0	12	34,3	20	57,1	3	8,6	0	0	35	100
3.	SKPD DI KOTA MAKASSAR ini memberikan kebebasan kepada setiap pegawai terhadap informasi yang dibutuhkan	0	0	14	40	20	57,1	1	2,9	0	0	35	100
4.	Kepentingan publik dengan golongan menjadi perhatian dan pertimbangan utama dalam pengelolaan anggaran	0	0	10	8,6	21	60	4	11,4	0	0	35	100
5.	Pelaporan pertanggungjawaban keuangan setiap tahun tepat waktu	0	0	9	25,7	24	68,6	2	5,7	0	0	35	100
6.	Kerjasama yang baik terjalin sejak lama dengan non Pemerintah dan media massa pengelolaan informasi	0	0	23	65,7	10	28,6	2	5,7	0	0	35	100
7.	Pemangku kepentingan mmudah untuk mengakses dokumen tentang RAPBD yang objektif dan berkualitas	0	0	16	45,7	17	48,6	2	5,7	0	0	35	100
8.	Pembagian peran dan tanggungjawab yang jelas dari masing-masing tingkatan di SKPD DI KOTA MAKASSAR membantu meningkatkan transparansi	0	0	16	45,7	14	40	5	14,3	0	0	35	100
9.	E-budgeting dapat meningkatkan transparansi anggaran	0	0	23	65,7	10	28,6	2	5,7	0	0	35	100
10.	Proses dan pertanggung jawaban dalam perancangan anggaran diawasi secara terus menerus	0	0	16	45,7	17	48,6	2	5,7	0	0	35	100

Sumber: Data Primer diolah SPSS, Tahun 2019

c. Tanggapan Responden Mengenai Profesionalisme

Pada tanggapan responden mengenai akuntabilitas terdapat 9 pernyataan yang diberikan dan jawaban yang ada bervariasi. Berdasarkan tanggapan responden mengenai variabel profesionalisme, maka rata-rata responden memberikan jawaban setuju dan sangat setuju. Meskipun ada 7 responden yang memberikan jawaban tidak setuju dan 1 responden sangat tidak setuju. Responden yang memberikan jawaban setuju dikarenakan setiap pegawai SKPD taat terhadap peraturan yang berlaku. Sedangkan, responden yang memberikan jawaban tidak setuju pada pernyataan dikarenakan setiap pegawai ada yang tidak memiliki moral yang baik. Selain itu pegawai yang memberikan jawaban sangat tidak setuju pada butir pernyataan ke 5 dikarenakan bertolak belakang dengan teori yang ada bahwa profesionalisme mendatangkan solusi dalam menanggapi permasalahan dalam tugas. Lihat pada tabel 4.9.

Tabel 4.9
Tanggapan responden Mengenai Profesionalisme

No	Profesionalisme	SS		S		N		TS		STS		Total	
		R	%	R	%	R	%	R	%	R	%	R	%
1.	Mengembangkan ide-ide atau masukan positif dalam menyelesaikan tugas yang diberikan oleh pimpinan	0	0	16	45,7	14	40	5	14,3	0	0	35	100
2.	Kualitas probadi yang dimiliki terus dikembangkan	0	0	17	48,6	13	37,1	5	14,3	0	0	35	100
3.	Berpikir secara sistematis dalam menyelesaikan tugas yang diberikan oleh pimpinan	0	0	17	48,6	15	42,9	3	8,6	0	0	35	100
4.	Cepat tanggap dalam menanggapi permasalahan dan menyelesaikan tugas kesektariatan oleh pegawai	0	0	14	40	18	51,4	3	8,6	0	0	35	100
5.	Mendatangkan solusi dalam menanggapi permasalahan dalam menyelesaikan tugas	0	0	17	48,6	15	42,9	2	5,7	1	2,9	35	100
6.	Setiap pegawai memiliki moral yang baik yaitu jujur dan bersih dan tindakan tercela dan mengutamakan kepentingan negara	0	0	12	34,3	16	45,7	7	20	0	0	35	100
7.	Setiap pegawai taat terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku	0	0	18	51,4	12	34,3	5	14,3	0	0	35	100
8.	Setiap pegawai memiliki kemampuan atau pengetahuan atas bidang tugasnya masing-masing	0	0	12	34,3	20	57,1	3	8,6	0	0	35	100
9.	Setiap pegawai bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas dengan benar, efektif dan efisien	0	0	14	40	20	57,1	1	0	0	0	35	100

Sumber: Data Primer diolah SPSS, Tahun 2019

d. Tanggapan Responden Mengenai Kinerja Perusahaan

Pada tanggapan responden mengenai akuntabilitas terdapat 6 pernyataan yang diberikan dan jawaban yang ada bervariasi. Berdasarkan tanggapan responden mengenai variabel kinerja keuangan, maka rata-rata responden memberikan jawaban setuju dan sangat setuju.

Tabel 4.10

Tanggapan responden Mengenai Kinerja Perusahaan

No	Kinerja Perusahaan	SS		S		N		TS		STS		Total	
		R	%	R	%	R	%	R	%	R	%	R	%
1.	Sumber daya yang dimiliki SKPD DI KOTA MAKASSAR ini mampu memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat dan lainnya	0	0	10	28,6	21	60	4	11,4	0	0	35	100
2.	Sumber daya yang dimiliki ampu memberikan capaian maksimal atas tercapainya pelayanan	0	0	9	25,7	24	68,6	2	5,7	0	0	35	100
3.	Tercapainya tujuan yang telah ditetapkan baik itu target sasaran jangka panjang maupun nilai yang telah ditetapkan	0	0	23	65,7	10	28,6	2	5,7	0	0	35	100
4.	Kemerataan kepada semua orang atas pelayanan yang diberikan berupa sarana serta bantuan yang diberikan kepada masyarakat	0	0	16	45,7	17	48,6	2	5,7	0	0	35	100
5.	Adanya evaluasi atas pelaksanaan program dan kegiatan	0	0	16	45,7	14	40	5	14,3	0	0	35	100
6.	Adanya evaluasi terhadap ekonomi, efisiensi, dan efektivitas apakah telah sesuai dengan target yang ditetapkan	0	0	12	34,3	16	45,7	7	20	0	0	35	100

Sumber: Data Primer diolah SPSS, Tahun 2019

Responden yang memberikan jawaban setuju dikarenakan tujuan yang telah ditetapkan baik target sasaran jangka panjang maupun nilai yang ditetapkan dapat tercapai. Responden yang memberikan jawaban netral dikarenakan sumber daya yang dimiliki kurang mampu memberikan capaian maksimal. Dan yang memberikan jawaban tidak setuju dikarenakan jarangya dilakukan evaluasi atas pelaksanaan program dan kegiatan.

4.2.4 Uji Instrumen Penelitian

a. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pernyataan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Uji validitas dihitung dengan membandingkan nilai r hitung (correlated item-total correlations) dengan nilai r tabel jika r hitung > dari r tabel (pada taraf signifikan 5%) maka pernyataan tersebut dinyatakan valid. Dari hasil yang di dapat menunjukkan bahwa nilai dari r hitung lebih besar dibandingkan dengan nilai r tabel ($n-2$) yang mana ($35-2=33$) pada r tabel dipeoleh nilai r tabel sebesar, berarti untuk uji kualitas data yang ditunjukkan dari uji validitas bahwa semua variabel adalah valid. Lihat pada tabel 4.11.

Tabel 4.11 Uji Validitas

Variabel	Item	Corrected Item (R hitung)	R tabel	Keterangan
Akuntabilitas (X1)	X1.1	0,562	0,287	VALID
	X1.2	0,486	0,287	VALID
	X1.3	0,605	0,287	VALID
	X1.4	0,498	0,287	VALID
	X1.5	0,607	0,287	VALID
	X1.6	0,373	0,287	VALID
	X1.7	0,264	0,287	VALID
	X1.8	0,248	0,287	VALID
Transparansi (X2)	X2.1	0,350	0,287	VALID
	X2.2	0,363	0,287	VALID
	X2.3	0,239	0,287	VALID
	X2.4	0,275	0,287	VALID
	X2.5	0,427	0,287	VALID
	X2.6	0,562	0,287	VALID
	X2.7	0,486	0,287	VALID
	X2.8	0,605	0,287	VALID
	X2.9	0,562	0,287	VALID
	X2.10	0,486	0,287	VALID
Profesionalisme (X3)	X3.1	0,605	0,287	VALID
	X3.2	0,498	0,287	VALID
	X3.3	0,607	0,287	VALID
	X3.4	0,373	0,287	VALID
	X3.5	0,264	0,287	VALID
	X3.6	0,248	0,287	VALID
	X3.7	0,350	0,287	VALID
	X3.8	0,363	0,287	VALID
	X3.9	0,239	0,287	VALID
Kinerja Keuangan (Y)	Y1	0,275	0,287	VALID
	Y2	0,427	0,287	VALID
	Y3	0,562	0,287	VALID
	Y4	0,486	0,287	VALID
	Y5	0,605	0,287	VALID
	Y6	0,248	0,287	VALID

Sumber: Data Primer diolah SPSS, Tahun 2019

b. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan dengan melihat hasil perhitungan nilai CronbachAlpha (α). Lihat pada tabel 4.12.

Tabel 4.12
Uji Reliabilitas

Variabel	Item	Cronbach Alpha	Standar Reliabilitas	Keterangan
Akuntabilitas (X1)	X1.1	0,888	0,60	VALID
	X1.2	0,890	0,60	VALID
	X1.3	0,887	0,60	VALID
	X1.4	0,889	0,60	VALID
	X1.5	0,887	0,60	VALID
	X1.6	0,892	0,60	VALID
	X1.7	0,894	0,60	VALID
	X1.8	0,894	0,60	VALID
Transparansi (X2)	X2.1	0,892	0,60	VALID
	X2.2	0,892	0,60	VALID
	X2.3	0,894	0,60	VALID
	X2.4	0,893	0,60	VALID
	X2.5	0,891	0,60	VALID
	X2.6	0,888	0,60	VALID
	X2.7	0,890	0,60	VALID
	X2.8	0,887	0,60	VALID
	X2.9	0,888	0,60	VALID
	X2.10	0,890	0,60	VALID
Profesionalisme (X3)	X3.1	0,887	0,60	VALID
	X3.2	0,889	0,60	VALID
	X3.3	0,887	0,60	VALID
	X3.4	0,892	0,60	VALID
	X3.5	0,894	0,60	VALID
	X3.6	0,894	0,60	VALID
	X3.7	0,892	0,60	VALID
	X3.8	0,892	0,60	VALID
	X3.9	0,894	0,60	VALID
Kinerja Keuangan (Y)	Y1	0,893	0,60	VALID
	Y2	0,891	0,60	VALID
	Y3	0,888	0,60	VALID
	Y4	0,890	0,60	VALID
	Y5	0,887	0,60	VALID
	Y6	0,894	0,60	VALID

Sumber: Data Primer diolah SPSS, Tahun 2019

Suatu variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai Cronbach Alpha (α) > 0,60 yaitu bila penelitian ulang dengan waktu dan variabel yang berbeda akan menghasilkan kesimpulan yang sama. Tetapi sebaliknya bila $\alpha < 0,6$ maka dianggap kurang handal, artinya bila variabel-variabel tersebut dilakukan penelitian ulang dengan waktu dan variabel yang berbeda akan menghasilkan kesimpulan yang berbeda. Nilai *cronbach's alpha* semua variabel memiliki *cronbach's alpha* lebih besar dari 0,60, sehingga dapat

disimpulkan bahwa indikator atau kuesioner yang digunakan untuk semua variabel semuanya dinyatakan handal atau dapat dipercaya sebagai alat ukur.

4.2.5 Uji Asumsi Klasik

4.2.5.1 Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2006) bahwa langkah awal yang harus dilakukan oleh setiap analisis multivariat, khususnya jika tujuannya adalah inferensi jika terdapat normalitas maka residual akan terdistribusi secara normal dan independen. Oleh karena itulah salah satu cara yang dilakukan dalam mendeteksi data yang normal adalah dengan *kolmogorov-smirnov*. Lebih lanjut menurut Ghozali bahwa nilai asymp sig (2 – tailed) yang lebih besar dari 0,05 berarti data memiliki distribusi yang normal.

Dalam kaitannya dengan uraian tersebut di atas, akan disajikan hasil olahan data uji normalitas dengan *kolmogorov-smirnov* yang dapat disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 4.13
Hasil Uji Normalitas Persamaan Pertama

		Unstandardized Residual
N		35
Normal Parameters	Mean	0,0000000
	Std. Deviation	0,95750920
Most Extreme Differences	Absolute	0,102
	Positive	0,048
	Negative	-0,102
Test Statistic		0,102
Asymp. Sig (2-tailed)		0,200 ^{c,d}

Sumber: Data Primer yang diolah (2019)

Tabel 4.14
Hasil Uji Normalitas Persamaan Kedua

		Unstandardized Residual
N		35
Normal Parameters	Mean	0,0000000
	Std. Deviation	0,46816510
Most Extreme Differences	Absolute	0,143
	Positive	0,143
	Negative	-0,066
Test Statistic		0,143
Asymp. Sig (2-tailed)		0,069 ^c

Sumber: Data Primer yang diolah (2019)

Berdasarkan tabel 4.13 dan tabel yakni hasil uji normalitas dengan nilai sig untuk persamaan pertama $0,200 > 0,05$ berarti dapatlah disimpulkan bahwa data yang akan digunakan dalam pengujian regresi pertama memiliki distribusi yang normal, alasannya karena memiliki nilai sig $> 0,05$. Begitu pula dengan nilai sig untuk persamaan kedua $0,069 > 0,05$ berarti dapatlah disimpulkan bahwa data yang akan digunakan dalam pengujian regresi kedua memiliki distribusi yang normal juga.

4.2.5.2 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas dilakukan untuk mengetahui adanya keterikatan antara variabel independen, dengan kata lain bahwa setiap variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independent lainnya, sehingga untuk mengetahui apakah ada kolinearitas dalam penelitian ini maka dapat dilihat dari nilai *variance inflation factor* (VIF).

Batas nilai VIF yang lebih dari 10 menunjukkan adanya kolinearitas yang tinggi, apabila terjadi gejala multikolinearitas, salah satu langkah untuk memperbaiki model adalah dengan menghilangkan variabel dalam model regresi. Untuk lebih jelasnya hasil uji multikolinieritas melalui tabel berikut ini :

Tabel 4.15
Uji Multikolinieritas Persamaan Pertama

Variabel	Colineritas Statistik		VIF	Keputusan
	Tolerance	VIF	Standar	
Akuntabilitas	0,867	1,153	10	Tidak ada gejala multikolinieritas
Transparansi	0,867	1,153	10	Tidak ada gejala multikolinieritas

Sumber: Data Primer diolah SPSS, Tahun 2019

Tabel 4.16
Uji Multikolinieritas Persamaan Kedua

Variabel	Colineritas Statistik		VIF	Keputusan
	Tolerance	VIF	Standar	
Akuntabilitas	0,025	8,414	10	Tidak ada gejala multikolinieritas
Transparansi	0,010	9,123	10	Tidak ada gejala multikolinieritas
Profesionalisme	0,120	1,022	10	Tidak ada gejala multikolinieritas
Akuntabilitas*Profesionalisme	0,177	5,645	10	Tidak ada gejala multikolinieritas
Transparansi*Profesionalisme	0,177	5,645	10	Tidak ada gejala multikolinieritas

Sumber : Data Primer diolah SPSS, Tahun 2019

Berdasarkan tabel untuk persamaan pertama nilai VIF untuk semua variabel lebih kecil dari 10. Karena lebih kecil dari 10, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah multikolinieritas pada model regresi pertama. Dan

berdasarkan tabel untuk persamaan kedua nilai VIF untuk semua variabel lebih kecil dari 10. Karena lebih kecil dari 10, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah multikolinieritas juga pada model regresi kedua.

4.2.5.3 Uji Heterokedastisitas

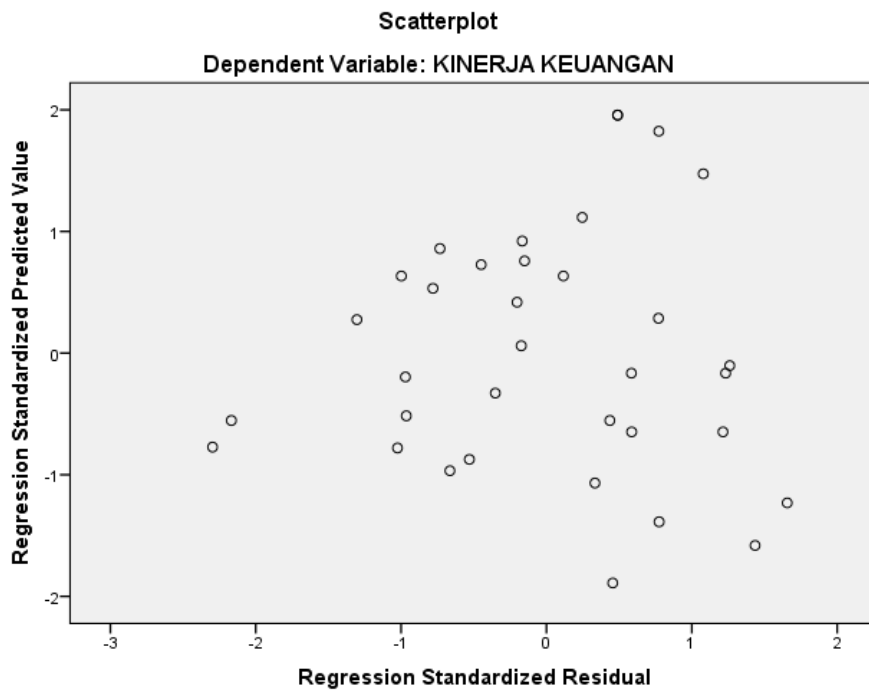
Heterokedastisitas akan mengakibatkan penaksiran koefisien-koefisien regresi menjadi tidak efisien. Diagnosis adanya heterokedastisitas dapat dilakukan dengan memperhatikan residual dan variabel yang diprediksi. Jika sebaran titik dalam plot terpencar disekitar angka nol (0 pada sumbu Y) dan tidak membentuk pola atau trend garis tertentu, maka dapat dikatakan bahwa model tidak memenuhi asumsi heterokedastisitas atau model regresi dikatakan memenuhi syarat untuk memprediksi. Heterokedastisitas diuji dengan menggunakan grafik *scatterplot*. Adapun dasar pengambilan keputusan tersebut adalah :

1. Jika ada pola tertentu yang membentuk pola tertentu yang teratur, maka terjadi heterokedastisitas
2. Jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar maka tidak terjadi heterokedastisitas.

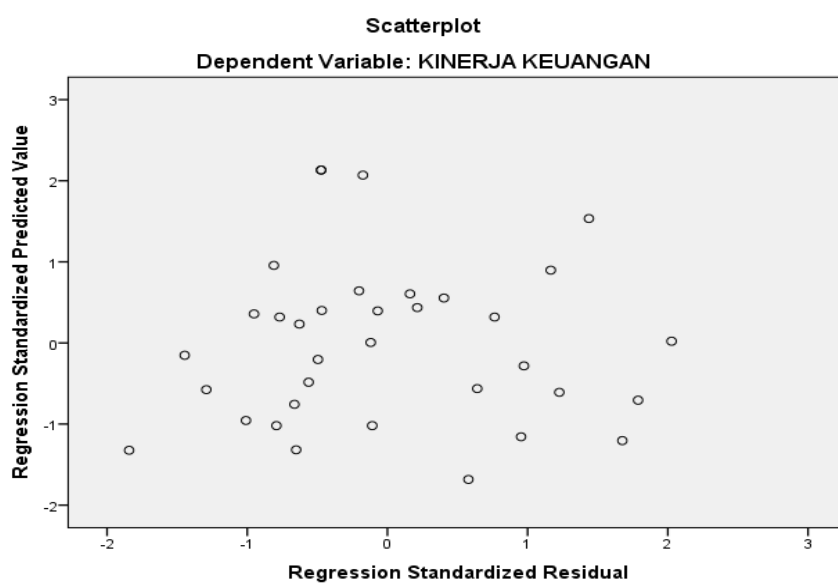
Hasil uji heterokedastisitas ditunjukkan pada gambar dibawah ini :

Gambar 4.1

Uji Scatterplot Persamaan Pertama

**Gambar 4.2**

Uji Scatterplot Persamaan Kedua



Berdasarkan grafik/gambar scatterplot untuk persamaan pertama dan kedua terlihat tidak ada pola yang jelas serta titik menyebar di atas dan dibawah dari angka 0, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heterokedstisitas.

4.2.6 Uji Regresi Berganda

Analisis data dilakukan dengan menggunakan regresi linear berganda dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh variabel akuntabilitas, transparansi, dengan profesionalisme sebagai variabel moderating terhadap kinerja keuangan. Statistical Package For Social Science (SPSS) akan digunakan untuk membantu proses analisis linear berganda.

Tabel 4.17
Hasil Regresi Berganda Persamaan Pertama

		Unstardize d Coefficient s	Standardize d Coefficients		
	B	Std. Error	Beta	t	Sig
(Constant)	8,45 7	1,736		4,873	0,00 0
AKUNTABILITA S	4,34 6	0,434	0,784	10,02 1	0,00 0
TRANSPARANSI	1,64 8	0,495	0,260	3,326	0,00 2

Sumber: Data Primer diolah SPSS, Tahun 2019

Berdasarkan pada tabel diatas maka didapatkan persamaan regresi linier berganda untuk persamaan pertama sebagai berikut:

$$Y = 8,457 + 4,346X_1 + 1,648X_2$$

Persamaan di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Nilai konstanta sebesar 8,457 menunjukkan bahwa bila variabel independennya nol maka kinerja keuangan yang dihasilkan sebesar 8,457.
- b. Nilai 4,346 pada variabel akuntabilitas (X1) adalah bernilai positif sehingga dapat dikatakan bahwa semakin tinggi akuntabilitas, berarti akan semakin tinggi pula kinerja keuangan. Koefisien regresi 4,346 menyatakan bahwa setiap penambahan 1 akuntabilitas maka akan menambah kinerja keuangan 4,346. Sehingga akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan.
- c. Nilai 1,648 pada variabel transparansi (X2) adalah bernilai positif sehingga dapat dikatakan bahwa semakin tinggi transparansi, berarti akan semakin tinggi pula kinerja keuangan. Koefisien regresi 1,648 menyatakan bahwa setiap penambahan 1 transparansi maka akan menambah kinerja keuangan sebesar 1,648. Sehingga transparansi berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan.

Tabel 4.18
Hasil Regresi Berganda Persamaan Kedua

	B	Unstandardized Coefficients Std. Error	Standardized Coefficients Beta	t	Sig
(Constant)	0,122	1,742		0,070	0,945
AKUNTABILITAS	0,816	1,079	0,147	0,756	0,030
TRANSPARANSI	0,732	0,593	0,116	1,234	0,004
PROFESIONALISME	0,154	0,193	0,176	0,796	0,003
AKUNTABILITAS*PROFESIONALISME	0,665	0,084	0,670	7,918	0,000
TRANSPARANSI*PEOFESIONALISME	0,360	0,092	0,331	3,907	0,000

Sumber: Data Primer diolah SPSS, Tahun 2019

Berdasarkan pada tabel diatas maka didapatkan persamaan regresi linier berganda untuk persamaan pertama sebagai berikut:

$$Y = 0,122 + 0,816X_1 + 0,731X_2 + 0,154X_3 + 0,665X_1X_3 + 0,360X_2X_3$$

Persamaan di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Berdasarkan hasil koefisien regresi maka diperoleh nilai koefisien regresi untuk variabel interaksi akuntabilitas dengan sanksi profesionalisme berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan yakni sebesar 0,665.
- b. Dari hasil pengolahan data koefisien regresi maka diperoleh nilai koefisien regresi untuk variabel interaksi transparansi dengan profesionalisme berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan yakni sebesar 0,360.

a. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi digunakan dalam mendeteksi seberapa jauh hubungan dan kemampuan model dalam menjelaskan variabel dependen. Pada data yang diolah terdapat empat variabel independen. Seperti pada tabel berikut.

Tabel 4.19
Koefisien Determinasi Persamaan Pertama

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,911 ^a	0,830	0,820	0,98698

Sumber Data Primer diolah SPSS, Tahun 2019

Tabel 4.20
Koefisien Determinasi Persamaan Kedua

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,986 ^a	0,972	0,967	0,42019

Sumber Data Primer diolah SPSS, Tahun 2019

Pada tabel koefisien determinasi untuk persamaan pertama terlihat bahwa R memperoleh nilai korelasi sebesar $R=0,911$ yang artinya korelasi atau hubungan antara akuntabilitas dan transparansi mempunyai pengaruh terhadap kinerja keuangan sebesar 91,1%. Kemudian nilai koefisien determinasi atau R Square sebesar $= 0,830$ yang artinya sebesar 83,0% pengaruh kinerja keuangan dipengaruhi oleh variabel akuntabilitas dan profesionalisme.

Pada tabel koefisien determinasi untuk persamaan kedua terlihat bahwa R memperoleh nilai korelasi sebesar $R=0,986$ yang artinya korelasi atau hubungan antara akuntabilitas dan transparansi dengan profesionalisme sebagai variabel moderating mempunyai pengaruh terhadap kinerja keuangan sebesar 98,6%. Kemudian nilai koefisien determinasi atau R Square sebesar $= 0,972$ yang artinya sebesar 97,2% pengaruh kinerja keuangan dipengaruhi oleh variabel akuntabilitas dan profesionalisme dengan profesionalisme sebagai pemoderasi.

b. Uji T (Parsial)

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing indikator dari variabel bebas terhadap variabel terikat. Uji t dilakukan

dengan membandingkan antara t-hitung dengan t-tabel. Untuk menentukan nilai t-tabel, maka ditentukan dengan tingkat signifikan 5% dengan derajat kebebasan $df = (n-k-1)$ dimana n adalah jumlah responden dan k adalah jumlah indikator/variabel. Lihat pada tabel 4.21 untuk uji t (parsial) untuk persamaan pertama dan pada tabel 4.22 untuk uji t (parsial) untuk persamaan kedua.

Tabel 4.21
Uji T (Parsial) Persamaan Pertama

		Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients		
	B	Std. Error	Beta	t	Sig
(Constant)	8,457	1,736		4,873	0,000
Akuntabilitas	4,346	0,434	0,784	10,021	0,000
Transparansi	1,648	0,495	0,260	3,326	0,002

Sumber: Data Primer diolah SPSS, Tahun 2019

Tabel 4.22
Hasil Uji T (Parsial) Persamaan Kedua

		Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients		
	B	Std. Error	Beta	t	Sig
(Constant)	0,122	1,742		0,070	0,945
AKUNTABILITAS	0,816	1,079	0,147	0,756	0,030
TRANSPARANSI	0,732	0,593	0,116	1,234	0,004
PROFESIONALISME	0,154	0,193	0,176	0,796	0,003
AKUNTABILITAS*PROFESIONALISME	0,665	0,084	0,670	7,918	0,000
TRANSPARANSI*PEOFESIONALISME	0,360	0,092	0,331	3,907	0,000

Sumber: Data Primer diolah SPSS, Tahun 2019

1. Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Kinerja Keuangan

Untuk t hitung sebesar 10,021 dan untuk nilai t tabel dari hasil $n-k-1$ (n =responden, k =variabel independen) sebesar 1,693. Dengan begitu

berdasarkan nilai t hitung sebesar $10,021 > 1,693$ dan untuk nilai probabilitas sebesar $0,00 < 0,05$ maka dapat disimpulkan H_0 ditolak dan H_a diterima, dengan demikian akuntabilitas berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kinerja keuangan. Sehingga hipotesis peneliti diterima.

2. Pengaruh Transparansi Terhadap Kinerja Keuangan

Untuk t hitung sebesar $3,326$ dan untuk nilai t tabel dari hasil $n-k-1$ (n =responden, k =variabel independen) sebesar. Dengan begitu berdasarkan nilai t hitung sebesar $3,326 > 1,693$ dan untuk nilai probabilitas sebesar $0,002 < 0,05$ maka dapat disimpulkan H_0 ditolak dan H_a diterima, dengan demikian transparansi berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kinerja keuangan. Sehingga hipotesis peneliti diterima.

3. Profesionalisme Memperkuat Hubungan Antara Akuntabilitas Terhadap Kinerja Keuangan

Pada tabel, dimana setelah adanya variabel profesionalisme, tingkat signifikan variabel akuntabilitas adalah $0,000$. Hasil regresi berganda menyatakan interaksi akuntabilitas terhadap profesionalisme adalah positif, sehingga dapat dikatakan bahwa profesionalisme memperkuat hubungan antara akuntabilitas terhadap kinerja keuangan karena tingkat signifikansi dari hasil regresi kedua lebih kecil dari $0,05$.

4. Profesionalisme Memperkuat Hubungan Antara Transparansi Terhadap Kinerja Keuangan

Pada tabel, dimana setelah variabel profesionalisme tingkat signifikan variabel transparansi adalah $0,000$. Hasil regresi berganda menyatakan interaksi transparansi terhadap profesionalisme adalah positif,

sehingga dapat dikatakan bahwa profesionalisme memperkuat hubungan antara transparansi terhadap kinerja keuangan karena tingkat signifikansi dari hasil regresi kedua lebih kecil dari 0.05.

c. Uji F (Simultan)

Tabel 4.23
Hasil Uji F (Simultan)

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Regression	178,591	5	35,718	202,299	0,000 ^b
Residual	5,120	29	0,177		
Total	183,712	34			

Sumber: Data Primer diolah SPSS, Tahun 2019

Dengan tingkat signifikan 5% dan derajat kebebasan $df_1 = 5$ dan $df_2 = 29$ maka f tabel didapat $(5:29)=2,55$. Berdasarkan uji anova atau uji F dari output SPSS, terlihat bahwa diperoleh f hitung sebesar $202,299 >$ nilai f tabel $2,55$ dan probabilitas sebesar $0,000 < 0,05$. Secara lebih tepat, nilai F hitung dibandingkan dengan F tabel dimana jika F hitung $>$ F tabel maka secara simultan variabel-variabel independen berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependen. Hal ini menunjukkan berarti Hipotesis kedua peneliti diterima. Lihat pada tabel 4.24 untuk hasil pengujian hipotesis.

Tabel 4.24
Hasil Pengujian Hipotesis

Keterangan	Hipotesis	Hasil
Hipotesis 1	Akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja keuangan	Diterima
Hipotesis 2	Transparansi berpengaruh terhadap kinerja keuangan	Diterima
Hipotesis 3	Proesionalisme dapat memperkuat hubungan antara akuntabilitas dan transparansi terhadap kinerja keuangan	Diterima

Sumber: Data Primer yang diolah (2019)

4.3 Pembahasan

4.3.1 Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Kinerja Keuangan

Dari hasil tersebut diatas, menunjukkan bahwa pada saat pengujian kualitas data semua pernyataan yang ada pada kuesioner dikatakan valid dengan ketentuan melebihi nilai r tabel dan untuk nilai reabilitas diatas standar dapat dikatakan kuesioner yang ada dinyatakan reliabel untuk pengujian selanjutnya. Pengolahan data yang dilakukan maka diperoleh hasil penelitian bahwa variabel akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan. Semakin tinggi akuntabilitas maka semakin tinggi pula kinerja keuangan. Akuntabilitas ialah satu unsur yang terpenting untuk mewujudkan suatu sistem pemerintahan yang bersih dan baik. Dengan adanya akuntabilitas tentunya akan mendorong dan meningkatkan kinerja instansi pemerintah bekerja dengan optimal dalam menjalankan program-program pemerintah serta dalam pengambilan kebijakan

publik, serta dalam mengambil tindakan kebijakan-kebijakan dapat tepat sasaran dan mencapai tujuan dan disini instansi pemerintah sebagai pengambil kebijakan harus mempertanggungjawabkan hasil kerjanya tersebut kepada publik.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Irna Setyaningrum pada tahun 2017 yang meneliti masalah akuntabilitas terhadap kinerja keuangan yang memperoleh hasil bahwa akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan BUMD di Yogyakarta. Begitupun yang dihasilkan oleh Nuzul Ibnu (2017) yang membuktikan akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja keuangan UPTD Taman Budaya Sulawesi Tenggara.

4.3.2 Pengaruh Transparansi Terhadap Kinerja Keuangan

Dari hasil tersebut diatas, menunjukkan bahwa pada saat pengujian kualitas data semua pernyataan yang ada pada kuesioner dikatakan valid dengan ketentuan melebihi nilai r tabel dan untuk nilai reabilitas diatas standar dapat dikatakan kuesioner yang ada dinyatakan reliabel untuk pengujian selanjutnya.

Pengolahan data yang dilakukan maka diperoleh hasil penelitian bahwa variabel transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan. Semakin tinggi transparansi maka semakin tinggi pula kinerja keuangan. Transparansi yang dilakukan pemerintah akan mendorong masyarakat berpartisipasi dalam pengambilan kebijakan pemerintah. Sehingga ada interaksi masyarakat dalam mengawasi serta menilai program-program pemerintah yang sudah atau belum terealisasi. Transparansi yang dilakukan pemerintah akan mendorong kinerja pemerintah bekerja dengan baik dalam pelaksanaan program-program pemerintah serta dalam pengambilan kebijakan publik.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Irna Setiyaningrum pada tahun 2017 yang meneliti masalah akuntabilitas terhadap kinerja keuangan yang memperoleh hasil bahwa akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan. Begitupun yang dihasilkan oleh Nuzul Ibnu (2017) yang membuktikan akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

4.3.3 Interaksi Profesionalisme dengan Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Kinerja Keuangan

Pengolahan data yang dilakukan maka diperoleh hasil penelitian bahwa variabel profesionalisme dapat memperkuat hubungan antara akuntabilitas terhadap kinerja keuangan. Seseorang dengan akuntabilitas tinggi memiliki keyakinan yang lebih tinggi bahwa pekerjaan mereka akan diperiksa oleh supervisor / manajer / pimpinan dibandingkan dengan seseorang yang memiliki akuntabilitas rendah. Dengan dibarengi profesionalisme, seseorang akan bertindak berdasarkan pada ilmu pengetahuan dan nilai-nilai profesi aparatur yang mengutamakan kepentingan publik. Sehingga dapat menghasilkan kinerja keuangan yang baik.

Adanya keterbukaan dalam penyelenggaraan urusan publik akan memudahkan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Pengawasan dari masyarakat dapat mencegah terjadinya misalokasi sumber daya maupun berbagai pelanggaran dalam kegiatan pemerintah seperti korupsi. Rendahnya tingkat transparansi dalam bentuk kurangnya sosialisasi terhadap berbagai produk hukum akan membuat pelanggaran hukum meningkat karena masyarakat tidak

mengetahui berbagai peraturan perundangan yang mengatur kehidupan mereka. Melalui transparansi, akan tercipta kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat karena masyarakat mengetahui apa-apa yang dilakukan oleh pemerintah. Dengan diperkuat profesionalisme, pelaksanaan pekerjaan yang sepenuh hati dan penuh rasa tanggungjawab agar masyarakat yang dilayani merasa terpuaskan kebutuhannya. Maka dari itu sangat dibutuhkan tenaga yang profesional agar terciptanya kinerja yang baik.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan:

1. Akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan SKPD di Kota Makassar
2. Transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan SKPD di Kota Makassar
3. Profesionalisme dapat memperkuat hubungan akuntabilitas dan transparansi terhadap kinerja keuangan SKPD di Kota Makassar.

5.2 Saran

1. Bagi SKPD di Kota Makassar
 - a. Kepada Pemerintah Kota Makassar untuk mempertahankan dan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, kinerja serta profesionalisme dalam menempatkan Pegawai Negeri dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai Abdi Negara.
 - b. Diharapkan Pemerintah Kota Makassar untuk mempertimbangkan kemampuan (*ability*) dan keterampilan (*skill*) seorang pegawai dalam memangku jabatan yang diberikan.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Disarankan bagi peneliti selanjutnya agar menambah ruang lingkup penelitian ini dengan menambah variabel independen maupun variabel dependen dan indikator jumlah responden.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Syukry. 2010. Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntabilitas Sektor Publik: Suatu Sarana *Good Governance*. 12 Januari 2010.
- Amalia, Rizka dan Ahmad Nur Fadholi. 2014. *Teori Behavioristik*. Bandung. Remaja Rosdakarya. Hal 44 – 45.
- Ardiansyah, Ahmad, Kertahadi & Rizki Yudhi Dewantara. 2016. Pengaruh Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kepuasan Wajib Pajak. *Jurnal Perpajakan (JEJAK)* 11 (1).
- Arief, Anggyansyah. 2013. Teori Keagenan (*Agency Theory*). Selasa 8 Januari, 2013.
- Asrida. 2012. Pengaruh Penerapan Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi Keuangan Terhadap Kinerja Penyusunan Anggaran Pada Pemerintah Kabupaten Bireun. *Jurnal Kebangsaan*. 1(1) : 29-40.
- Fahmi, Irham. 2014. *Manajemen Keuangan Perusahaan dan Pasar Modal*. Edisi Pertama Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Fahyuni, Eni Fariyatul dan Istikomah. 2016. Psikologi Belajar dan Mengajar. Sidoarjo. Nizamia Learning Center. Hal 26-27.
- Fujianti, Lailah. 2012. Pengaruh Profesionalisme terhadap Komitmen Organisasi dan Kepuasan Kerja Serta Dampaknya terhadap Kinerja Akuntan Pendidik. Forum Bisnis dan Keuangan I, Prosiding Seminar Nasional, hal 816-829.
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Hall, Richard H., 1968. "Professionalization and bureaucratation". *American Sociological*. 33(1), 92–104.
- Indriantoro, Nur., dan Supomo, Bambang. 2013. *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi & Manajemen*. Yogyakarta: BPFE.
- Iswahyudi, Aries., Iwan Triyuwono, dan M. Achsin. 2016. Hubungan Pemahaman Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi, Value For Money dan *Good Governance*. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*. 1(2) : 151-166.

- Januari, Cindi Ismi., Hamidah Hayati Utami, dan Ika Ruhana. 2015. Pengaruh Penilaian Kinerja Terhadap Kepuasan Kerja dan Prestasi Kerja. *Jurnal Administtrasi Bisnis*. 24(2) : 1-8.
- Kasmir. 2016. *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kieso, Donald E, et al. 2016. *Intermediate Accounting*. Asia: John Wiley & Sons Inc.
- Kuncoro, Mudrajad. 2013. *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Pangumbalerang, Angreini, dan Sherly Pinatik. 2014. Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Dinas Pendapatan Daerah dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah. *Jurnal Emba*. 2(2) : 800-808.
- Purnomo, Dheny. 2016. Persepsi Users Atas Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Katalogis*. 4(6) : 91-100.
- Singgih dan Icu. 2010. Pengaruh Independensi, Pengalaman, Due Profesional care, dan Akuntabilitas terhadap Kualitas Audit (Studi pada Auditor di KAP “Big Four” di Indonesia). SNA 13 Purwokerto.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. Bandung: Afabeta.
- _____. 2012. *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: Afabeta.
- Sujarweni, V Wiratna. 2016. *Kupas Tuntas Penelitian Akuntansi dengan SPSS*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Suntoyo, Danang. 2012. *Metodologi Penelitian Akuntansi*. Bandung : Refika Aditama.
- Utama, Daniel Aditya dan Rediana Setiyana. 2014. Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan Responsibilitas Pengelolaan Keuangan Sekolah Terhadap Kinerja Guru. *Jurnal Pendidikan Ekonomi dan Dinamika Pendidikan*. 9(2) :100-114.
- Waluyo dan Wirawan Ilyas .2002. *Perpajakan Indonesia*. Edisi Pertama. Jakarta : Salemba Empat.
- “26 SKPD di Kota Makassar Mendapat Rapor Merah,” *Tribun Makassar*, 09 November 2018).

“Seminar Hubungan Media dan Pemerintah Kota Makassar,” *Tribun Makassar*, 21 November 2018).

American Accounting Association. 2016. *Pengertian Akuntansi*. (<http://www.ekonomi.sobatmateri.com/definisi-akuntansi.html>, diakses 19 November 2018).

APB Statement No. 4 (AICPA). 2016. *Tujuan Laporan Keuangan*. (<https://skripsirian.blogspot.co.id/2016/07/teori-akuntansi-tujuan-laporan-keuangan.html>, diakses 19 November 2018).